

**MANFAAT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PUGER TERHADAP
KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN PUGER,
KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR**

**SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Oleh :
ERVAN YULIANTO
NIM. 105080413111015



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2014

**MANFAAT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PUGER TERHADAP
KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN PUGER,
KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR**

**LAPORAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
ERVAN YULIANTO
NIM. 105080413111015



**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2014

SKRIPSI

MANFAAT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PUGER TERHADAP KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN PUGER, KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR

Oleh :
ERVAN YULIANTO
NIM. 105080413111015

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 18 Desember 2014

Dosen Penguji I

Menyetujui
Dosen Pembimbing I

(Dr.Ir. Mimit Primyastanto, MP)

NIP. 19630511 198802 1 001

Tanggal :

(Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP)

NIP. 19640226 198903 2 003

Tanggal :

Dosen Penguji II

Dosen Pembimbing II

Erlinda Indrayani, S.Pi, M.Si

NIP. 19740220 200312 2 001

Tanggal :

(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)

NIP. 19610417 199003 1 001

Tanggal :

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP)

NIP. 19610417 199003 1 001

Tanggal :

PERNYATAAN ORISINALITAS

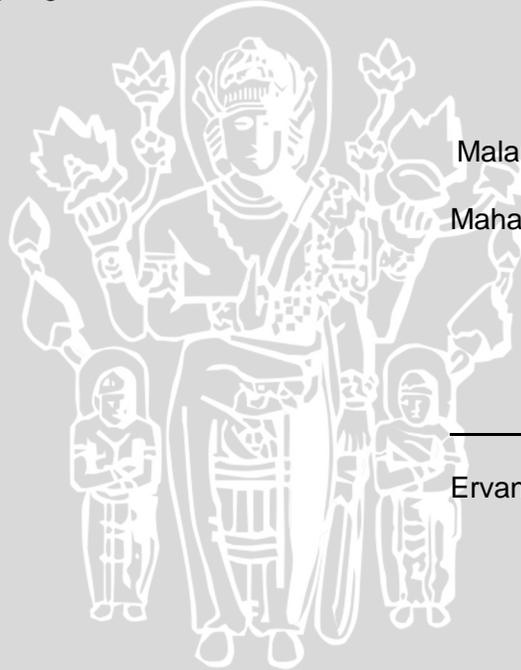
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang, Desember 2014

Mahasiswa

Ervan Yulianto



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan laporan dengan judul “Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” ini banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga atas terselesaikannya laporan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Kedua orang tua terbaik, Tutik Widayati, Erik Tri Cahyati, Nenek Raminten, Supriadi, Matdarto dan seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tinggi untuk penulis.
- Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP selaku dosen pembimbing I dan Dr. Ir. Nuddin Harahap, MP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan laporan ini.
- Dr. Ir. Mimit Primyastanto, MP dan Ibu Erlinda Indrayani S.Pi, M.Si sebagai Dosen Penguji pada sidang skripsi dan telah mengarahkan penulis dalam memperbaiki laporan skripsi ini.
- Bapak Arief Wahyudi selaku Kepala UPPPP Puger, seluruh pihak UPPPP Puger, serta masyarakat PPP Puger yang sudah memberikan banyak bantuan selama penulis melakukan penelitian ini.
- Agung Eka Putra dan Niken Puji Astuti sekeluarga yang telah mengizinkan penulis untuk tinggal bersama selama penulis melakukan penelitian di Puger.
- Hendry, Lukman BS, Alan, Hendy, Aliyah, Ayu Damanik, Deasy, Arief, Akbar, alumni KRD 6A, FPIK '10, Print ALKOM NET, dan anggota Indo ManUtd Region Malang.

RINGKASAN

ERVAN YULIANTO. Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur. **Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP dan Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP**

Secara umum pemanfaatan sumberdaya ikan di Indonesia sampai saat ini belum optimal, Opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan. Salah satu Pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yang berlokasi di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur. Adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger telah memicu perkembangan perekonomian baik bagi masyarakat secara langsung maupun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui profil Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, menganalisis manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan menganalisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UPPPP Puger sebagai bahan evaluasi pengelolannya, bagi masyarakat sebagai informasi bahwa mereka memiliki kewajiban yang harus dipenuhi saat melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan, dan bagi akademisi sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lanjutan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode survey untuk mengetahui rata-rata skala usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, meliputi tingkat pendapatan dan keuntungan yang didapatkan oleh mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sementara itu, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yakni pengambilan sampel penelitian dari sebuah populasi yang didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan. Metode *purposive sampling* dipilih karena dengan menggunakan metode ini bisa lebih mudah mengarahkan penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sebelumnya berstatus sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan kemudian setelah ditetapkannya Keputusan Menteri dan Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2004, maka statusnya berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai. Pelabuhan Perikanan Pantai Puger berfungsi sebagai kegiatan ekonomi dan pusat pengembangan industri perikanan. Sementara itu, pelabuhan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat salah satunya adalah munculnya peluang usaha baik di bidang perikanan maupun non perikanan, dengan menjalankan usaha tersebut akan menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Pendapatan yang mereka dapatkan tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalani.

Usaha perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah usaha penangkapan, usaha penjualan hasil perikanan, usaha pengepakan, usaha pengolahan, dan jasa angkut hasil tangkapan (manol). Usaha penangkapan terdiri

dari 3 jenis yaitu nelayan sekoci yang setiap tahunnya pendapatan mereka mencapai Rp 617.600.000,00 dan keuntungan mencapai Rp 300.760.000,00 per tahun, nelayan jukung dengan pendapatan mencapai Rp 96.000.000,00 per tahun atau memiliki keuntungan sebesar Rp 40.995.000,00 per tahun, dan ketiga nelayan payang yang pendapatan per tahunnya bisa mencapai Rp 2.240.000.000,00 sehingga keuntungan yang bisa dicapai sebesar Rp 1.728.100.000,00/tahun.

Usaha penjualan terdiri dari 2 jenis yaitu penjualan ikan segar dan penjualan produk olahan. Usaha penjualan ikan segar setiap tahunnya bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 112.250.000,00 dengan keuntungan setiap tahunnya sebesar Rp 11.790.000,00, sedangkan usaha penjualan produk olahan bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 111.750.000,00/tahun dengan keuntungan sebesar Rp 11.290.000,00/tahun.

Usaha pengolahan yang paling banyak diminati di Puger adalah pengolahan terasi dan pengolahan ikan asin. Usaha pengolahan terasi memiliki tingkat pendapatan mencapai Rp 48.000.000,00 setiap tahunnya dan keuntungan sebesar Rp 26.967.200,00/tahun sedangkan usaha pengolahan ikan asin setiap tahunnya bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 84.000.000,00 atau memiliki keuntungan mencapai Rp 20.991.200,00/tahun.

Usaha pengepakan yang ada di Pelabuhan Perikanan Puger bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 5.088.000.000,00 setiap tahunnya, sedangkan keuntungan yang didapatkan mencapai Rp 363.465.500,00/tahun.

Selain usaha-usaha tersebut di atas, usaha di bidang perikanan yang juga terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah jasa angkut hasil tangkapan (manol). Setiap manol memiliki penghasilan sebesar Rp 20.000,00 – Rp 100.000,00 setiap harinya. Tinggi rendahnya penghasilan yang diperoleh manol tergantung pada jumlah ikan hasil tangkapan yang diangkut dari kapal menuju darat.

Usaha di luar perikanan yang ada dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger diantaranya adalah penjual es degan, penjual bakso, dan jasa transportasi Pulau Kucur. Untuk penjual es degan rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp 29.400.000,00 dengan keuntungan mencapai Rp 8.065.715,00/tahun, untuk penju bakso dalam setahun rata-rata pendapatan yang dihasilkan sebesar Rp 39.200.000,00 dan keuntungan mencapai Rp 12.050.000,00/tahun, sedangkan untuk jasa transportasi Pulau Kucur setiap harinya bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 20.000,00 – Rp 100.000,00 tergantung ramai tidaknya pengunjung yang datang.

Sementara itu, untuk kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD dibagi menjadi dua yaitu PAD Jember dan PAD Jawa Timur. Seharusnya PAD Jember didapatkan dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger tetapi saat ini TPI Puger tidak berfungsi sehingga tidak bisa berkontribusi terhadap PAD Jember. Tetapi untuk sektor perikanan tangkap bisa berkontribusi melalui retribusi izin usaha perikanan tangkap dengan ukuran kapal kurang dari 10 GT senilai Rp 3.300.000,00 atau sebesar 0,07% dari PAD Jember secara keseluruhan. Sedangkan untuk kontribusi terhadap PAD Jawa Timur didapatkan dari pemasukan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger senilai Rp 53.961.000,00 atau sebesar 0,00059% dari PAD Jawa Timur secara keseluruhan. Nilai tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada, tentunya hal ini mendorong pemerintah untuk berupaya mengoptimalkan potensi-potensi yang ada untuk lebih meningkatkan pemasukan terhadap PAD.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur”.

Secara garis besar, skripsi ini membahas tentang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger meliputi pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia yang terdapat di dalamnya. Hal ini dikarenakan dengan melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya tersebut akan memberikan manfaat terutama di bidang ekonomi mereka dengan terbukanya peluang usaha dan lebih jauh lagi dengan pengelolaan yang tepat akan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Sangat disadari oleh penulis, bahwasanya dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kebermanfaatannya laporan ini.

Malang, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan.....	4
1.4. Kegunaan	5
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Sumberdaya.....	6
2.1.1. Sumberdaya Manusia	6
2.1.2. Sumberdaya Alam dan Buatan.....	6
2.1.3. Sumberdaya Pesisir	7
2.2. Pelabuhan Perikanan.....	8
2.2.1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan	9
2.2.2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	10
2.2.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	12
2.2.4. Fungsi Pelabuhan Perikanan	14
2.2.5. Produk Pelabuhan Perikanan.....	16
2.3. Pelabuhan Perikanan Terhadap Perekonomian	16
2.4. Pendapatan Masyarakat Pesisir.....	16
2.5. Pendapatan Asli Daerah	17
2.6. Penelitian Terdahulu	19
2.7. Kerangka Berpikir.....	21
3. METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.2. Pendekatan Penelitian	24
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3.1. Data Primer.....	25
3.3.2. Data Sekunder	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5. Metode Pengambilan Sampel	28
3.6. Analisa Data	32

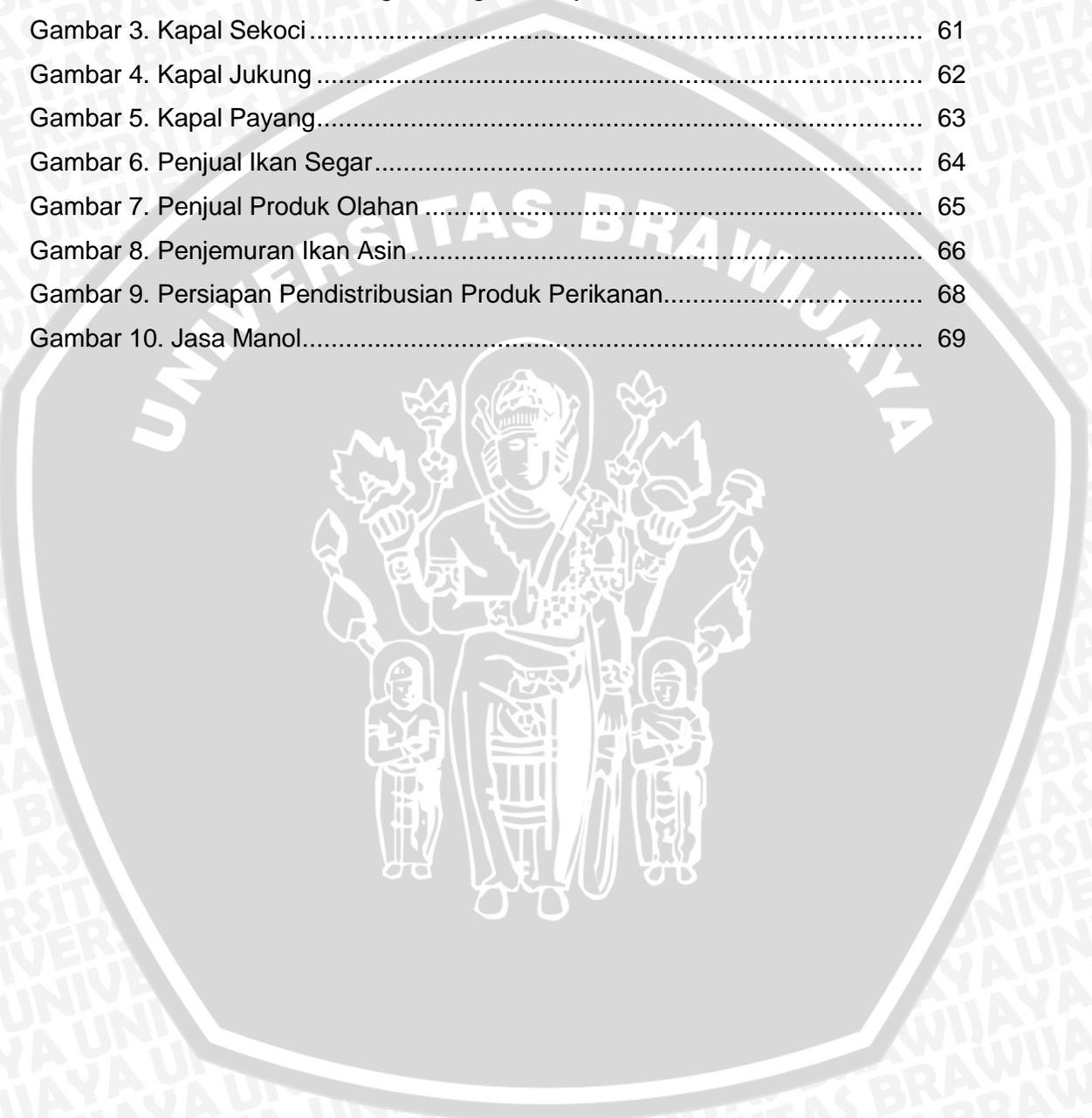
3.6.1. Analisa Data Kualitatif	33
3.6.2. Analisa Data Kuantitatif	34
3.7. Batasan Masalah dan Definisi Operasional	36
3.7.1. Batasan Masalah	36
3.7.2. Definisi Operasional	37
4. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Puger	39
4.2. Data Kependudukan	39
4.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
4.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
4.2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	41
4.3. Kondisi Kesejahteraan Penduduk	41
4.4. Potensi Sumberdaya Alam	41
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1. Profil Pelabuhan Perikanan Pantai Puger	45
5.1.1. Tugas Pokok UPPPP Puger	45
5.1.2. Produksi Hasil Tangkapan UPPPP Puger	45
5.1.3. Armada Perikanan Tangkap UPPPP Puger	46
5.1.4. Alat Tangkap UPPPP Puger	47
5.1.5. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Puger	47
5.2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger	50
5.2.1. Pengelolaan Terhadap Sumberdaya Perikanan	50
5.2.2. Pengelolaan Terhadap Lingkungan	52
5.2.3. Pengelolaan Terhadap Sumberdaya Manusia	53
5.2.4. Pengelolaan Terhadap Aktivitas Masyarakat	54
5.2.5. Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Religius	59
5.3. Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger	59
5.3.1. Usaha Perikanan	59
5.3.2. Usaha Non-Perikanan	69
5.4. Kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap PAD	72
5.4.1. Kontribusi Terhadap PAD Jember	72
5.4.2. Kontribusi Terhadap PAD Jawa Timur	77
5.5. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger ...	79
6. Kesimpulan dan Saran	82
6.1. Kesimpulan	82
6.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Zonasi Kegiatan dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	15
Tabel 2. Sampel Penelitian	31
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	40
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	43
Tabel 6. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi UPPPP Puger.....	46
Tabel 7. Perkembangan Armada Penangkapan UPPPP Puger	46
Tabel 8. Tabel Perkembangan Alat Tangkap UPPPP Puger.....	47
Tabel 9. Tabel Fasilitas Pokok UPPPP Puger.....	48
Tabel 10. Tabel Fasilitas Fungsional UPPPP Puger	48
Tabel 11. Fasilitas Penunjang UPPPP Puger	49
Tabel 12. Modal dan Biaya Nelayan Sekoci.....	61
Tabel 13. Modal dan Biaya Nelayan Jukung.....	61
Tabel 14. Modal dan Biaya Nelayan Payang	64
Tabel 15. Modal dan Biaya Penjual Ikan Segar	65
Tabel 16. Modal dan Biaya Penjual Produk Olahan	66
Tabel 17. Modal dan Biaya Usaha Pengolahan Ikan Asin.....	67
Tabel 18. Modal dan Biaya Usaha Pengolahan Terasi	67
Tabel 19. Modal dan Biaya Usaha Pengepakan	68
Tabel 20. Modal dan Biaya Penjual Es Degan.....	70
Tabel 21. Modal dan Biaya Penjual Bakso.....	72
Tabel 22. Perda Jember No. 6 Tahun 2011	73
Tabel 23. Pemasukan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	23
Gambar 2. Sosialisasi dan Pengembangan Nelayan	54
Gambar 3. Kapal Sekoci.....	61
Gambar 4. Kapal Jukung	62
Gambar 5. Kapal Payang.....	63
Gambar 6. Penjual Ikan Segar.....	64
Gambar 7. Penjual Produk Olahan	65
Gambar 8. Penjemuran Ikan Asin.....	66
Gambar 9. Persiapan Pendistribusian Produk Perikanan.....	68
Gambar 10. Jasa Manol.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Provinsi Jawa Timur 88

Lampiran 2. Peta Pelabuhan Perikanan Pantai Puger 89

Lampiran 3. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger 90

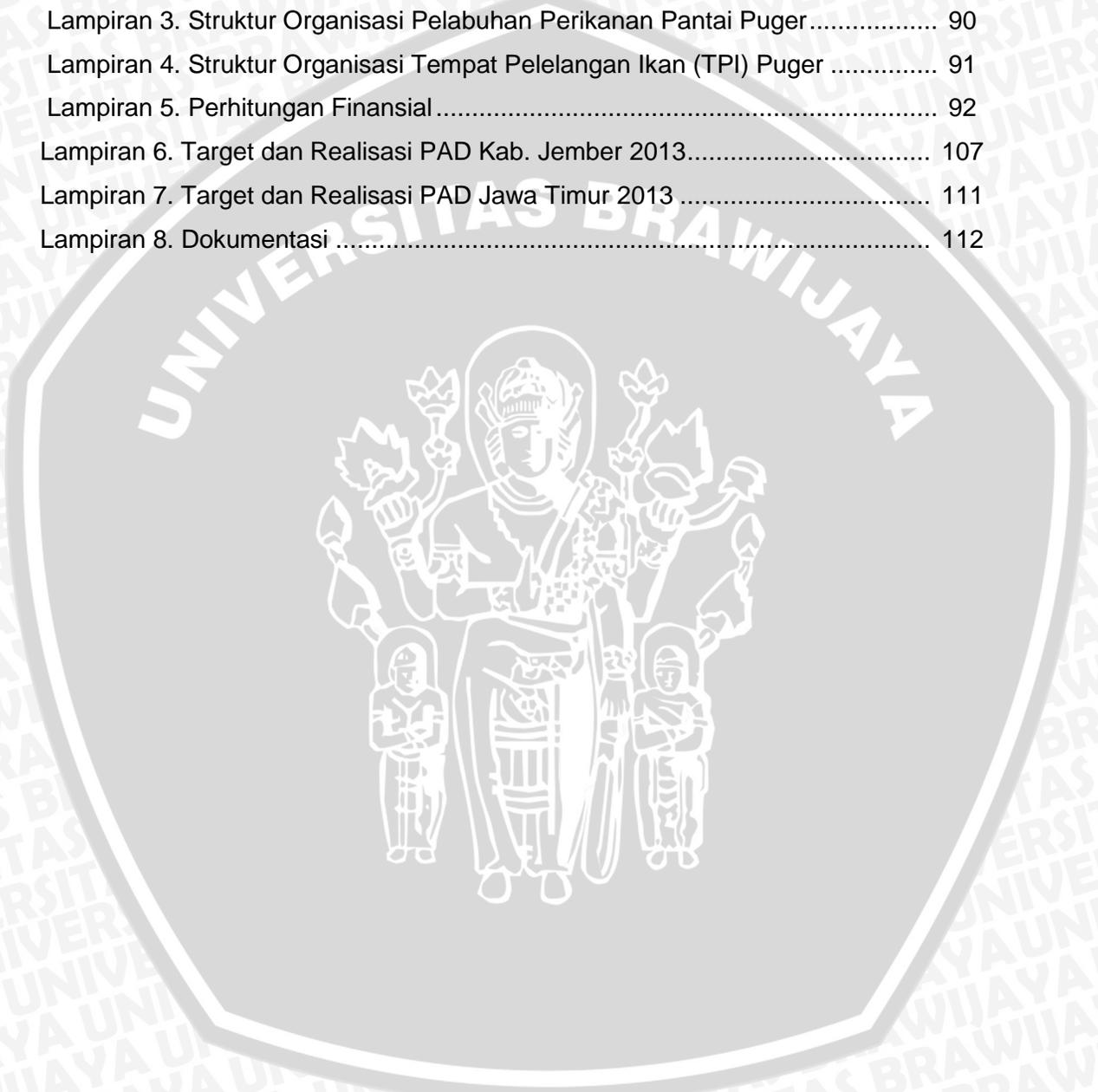
Lampiran 4. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger 91

Lampiran 5. Perhitungan Finansial 92

Lampiran 6. Target dan Realisasi PAD Kab. Jember 2013..... 107

Lampiran 7. Target dan Realisasi PAD Jawa Timur 2013 111

Lampiran 8. Dokumentasi 112



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan (pengembangan) wilayah adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan di atas permukaan (daratan atau perairan), di mana terjadi interaksi antara sumberdaya manusia (SDM) dengan sumberdaya alam (SDA), sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan yang lainnya. Peranan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) sangat penting dalam pembangunan. Terdapat slogan yang mengatakan bahwa suatu bangsa yang maju, bila memiliki sumberdaya manusia (penduduk) yang berkemampuan dalam jumlah yang cukup dan sumberdaya alam yang potensial (Adisasmita, 2013).

Program pembangunan di suatu wilayah pasti membutuhkan peran aktif dari pemerintah yang terkait. Peran aktif pemerintah dalam pembangunan bisa berwujud kebijakan-kebijakan tertentu seperti pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan modal usaha, membentuk peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada sumber daya alam maupun sumber daya manusia di suatu wilayah, dan sebagainya.

Selain peran pemerintah, peran aktif masyarakat juga merupakan faktor penting penentu keberhasilan suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya (Mardikanto dan Poerwoko, 2013).

Berdasarkan aspek geografis, masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir. Mereka menggantungkan kelangsungan hidupnya dari upaya mengelola sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya, yakni di kawasan pesisir, perairan (laut), dan pulau-pulau kecil. Secara umum, sumber daya perikanan (tangkap dan budidaya) merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Karena itu, sumber daya perikanan mengambil peranan yang besar sebagai penggerak dinamika ekonomi lokal di desa pesisir (Kusnadi, 2006).

Secara umum pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia sampai saat ini belum optimal dan masih berpeluang untuk dikembangkan. Salah satu pengembangannya adalah melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang perikanan yang diharapkan mampu meningkatkan usaha perikanan tangkap baik untuk skala kecil maupun besar yang nantinya dapat menghidupkan sektor perekonomian bagi penduduk di sekitar wilayah pelabuhan perikanan.

Pembangunan pelabuhan perikanan untuk menggali potensi sumberdaya perikanan laut akan memicu perkembangan perekonomian daerah terutama yang berkaitan dengan industri perikanan dan kelautan (maritim). Pengembangan pelabuhan tersebut selain berdampak pada peningkatan produksi perikanan juga akan memacu pertumbuhan sektor lainnya di daerah *hinterland* (*multiplier effects*). Berbagai industri terkait sebagai bangkitan dari adanya pelabuhan tersebut diharapkan akan tumbuh seperti industri pengolahan/pengalengan ikan, industri penangkapan ikan (jaring, alat pancing, dsb), dan warung/toko yang menjual

perbekalan nelayan saat melaut, pabrik es, ruang pendingin (*cool storage*), perbankan, membuka lapangan kerja, dsb. Dengan demikian maka nilai *multiplier effects* dari investasi yang ditanamkan untuk pelabuhan tersebut akan tinggi, di samping itu produktivitas dan efisiensi pemanfaatan pelabuhan tinggi sehingga biaya pembangunan dan pemeliharaan akan menjadi relatif kecil dibanding manfaatnya. Bisa dikatakan bahwa pembangunan pelabuhan akan meningkatkan perekonomian daerah (Triatmodjo, 2009).

Salah satu pelabuhan perikanan di Indonesia adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yang terletak di Kabupaten Jember Jawa Timur. Wilayah Puger memiliki potensi perikanan yang menjadi penghasil ikan utama di Jember. Potensi perikanan di wilayah ini dikelola oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger Kabupaten Jember. Warga yang bertempat tinggal di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sebagian besar menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan, terutama sebagai nelayan.

Potensi sumberdaya perikanan yang ada di kawasan ini berupa sumberdaya ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Sedangkan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di UPPPP Puger Jember diantaranya adalah jasa/sewa pemakaian (tanah, bangunan, warung/kios), jasa pemakaian peralatan penangkapan ikan, pemeliharaan dan perbaikan kapal, bongkar muat ikan, penitipan kendaraan roda dua dan roda empat, perbekalan nelayan selama melaut, dsb. Sementara itu produk yang menjadi unggulan di UPPPP Puger berupa ikan tuna dan produk olahan yaitu terasi.

Dengan potensi sedemikian rupa, tentunya dibutuhkan pengelolaan yang tepat agar sumber daya yang tersedia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger . Dilihat

dari sudut pandang ekonomi, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya-sumberdaya tersebut akan bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Selain berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, lebih jauh lagi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profil Pelabuhan Perikanan Pantai Puger?
2. Bagaimana pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger?
3. Bagaimana manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di dalamnya?
4. Bagaimana kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui profil Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.
2. Mengetahui pengelolaan pelabuhan perikanan pantai puger.

3. Mengetahui dan menganalisis manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di dalamnya.
4. Mengetahui dan menganalisis kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4. Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan akan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi UPPPP Puger, sebagai bahan informasi dan evaluasi tentang pengelolaan pelabuhan perikanan sehingga diharapkan ke depannya bisa ditentukan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
2. Bagi masyarakat, sebagai informasi bahwa dengan adanya Pelabuhan Pantai Puger bisa memberikan manfaat secara ekonomi sehingga mereka bisa lebih memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana.
3. Bagi akademisi/peneliti, sebagai bahan informasi dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor penting untuk menjalankan suatu proses produksi, salah satunya proses produksi di pelabuhan perikanan melalui pengelolaannya. Sementara itu, untuk melakukan pengelolaan pelabuhan perikanan, sumberdaya yang termasuk di dalamnya adalah sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan buatan, serta sumberdaya pesisir.

2.1.1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan (Asiabrain, 2010).

Menurut Parwiyanto (2009) dalam Muma'izah (2013), sumberdaya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

2.1.2. Sumberdaya Alam Dan Sumberdaya Buatan

Semua kekayaan bumi, baik yang bersifat biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumberdaya alam. Sedangkan menurut Godam (2006) dalam Muma'izah (2013) menjelaskan bahwa sumber daya alam (SDA) adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup

kita dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumberdaya alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya.

Sumberdaya buatan merupakan sumberdaya yang sengaja diciptakan oleh manusia di suatu wilayah yang bertujuan untuk menunjang segala macam aktivitas yang terdapat di wilayah tersebut. Contoh dari sumberdaya buatan adalah berupa fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, tempat ibadah, warung, perbengkelan, pasar, dan sebagainya.

2.1.3. Sumberdaya Pesisir

Menurut Kusnadi (2006), wilayah pesisir adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan lautan atau sebaliknya. Di wilayah ini, sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu perspektif mata pencaharian masyarakat pesisir tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam, seperti nelayan, petambak, pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap.

Sementara itu pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dijelaskan bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam,

permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya ikan, sumberdaya lingkungan, serta segala sumberdaya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan, sehingga pengelolaan atau manajemen sumberdaya perikanan mencakup penataan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan lingkungannya, serta pengelolaan kegiatan manusia (Nikijuluw, 2002).

2.2. Pelabuhan Perikanan

Secara umum pelabuhan laut (*seaport*) diartikan sebagai suatu tempat yang berfungsi melayani kunjungan (kedatangan) kapal-kapal laut yang melakukan kegiatan bongkar-muat barang dan menaikkan dan menurunkan penumpang ke dan dari kapal. Pelabuhan laut terletak di tepi laut yang merupakan titik pindah muat (*transshipment point*). Komoditas hasil pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) yang dikirimkan keluar daerah (diekspor atau diantar-pulaukan) diangkut menggunakan transportasi darat (*truck*) selanjutnya diangkut oleh transportasi laut (kapal laut) menuju pelabuhan tujuan baik dalam negeri atau luar negeri (Adisasmita, 2013).

Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Sementara itu yang

perlu diperhatikan dalam pelabuhan perikanan adalah klasifikasi, pengelolaan, fasilitas, fungsi, dan produk pelabuhan perikanan.

2.2.1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan bab VII mengenai klasifikasi pelabuhan perikanan, maka pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu:

1. PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera), kriteria teknis:

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan di perikanan laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas.
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT.
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.
- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6000 GT kapal perikanan sekaligus.
- e. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor.
- f. Terdapat industri perikanan.

2. PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), kriteria teknis:

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT.
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m.

- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus.
- e. Terdapat industri perikanan.

3. PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai), kriteria teknis:

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial.
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT.
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m.
- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan.

4. PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan), kriteria teknis:

- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, dan perairan kepulauan.
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT.

2.2.2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Dalam pengelolaannya, pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan merupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pelabuhan perikanan merupakan pintu gerbang berbagai aktivitas kenelayanan mulai pra sampai pasca produksi. Dengan demikian, banyak tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, baik nelayan maupun non nelayan yang

bergerak di bidang perikanan. Untuk menunjang segala aktivitas kegiatan yang ada di dalamnya, maka pelabuhan perikanan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai (Muawanah, 2013).

Pada dasarnya terdapat empat tipe pengelolaan pelabuhan, dimana masing-masing tipe mempunyai pola yang berbeda menurut Lubis (2006) dalam Ginting (2011) yaitu:

a. Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pengelola pelabuhan sekaligus pemiliknya. Biaya pengoperasian pelabuhan dapat ditunjang oleh pemerintah daerah tidak terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti perbaikan dan perluasan dermaga ada juga bantuan finansial dari pemerintah pusat.

b. Pengelolaan oleh Perusahaan Umum (Semi Publik)

Pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh perusahaan umum yang dipercayakan oleh pemerintah setempat. Pelayanan umum dapat porsi yang layak dalam pengelolaan tipe ini. Anggaran tidak lagi merupakan bagian anggaran pemerintah daerah tapi dari pelabuhan sendiri.

c. Pengelolaan oleh Pemerintah Pusat

Pengelola dan pemilik pelabuhan ini adalah pemerintah pusat. Fasilitas yang ada sifatnya milik umum dan dikelola oleh wakil-wakil yang ditunjuk pemerintah pusat dan bertanggung jawab langsung kepadanya.

d. Pengelolaan oleh Swasta

Infrastruktur dibangun oleh perusahaan swasta sendiri atau sebagian mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pelabuhan ini dikelola oleh suatu

perusahaan swasta atau satu grup swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata-mata, dalam hal ini kepentingan umum terabaikan, hanya pelayanan atau kegiatan yang memberikan keuntungan saja dilakukan sedangkan kegiatan yang tidak menguntungkan meskipun diperlukan oleh masyarakat tidak dilakukan.

Pengelolaan pelabuhan perikanan terdiri dari pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya buatan yang tersedia, sehingga dalam pengelolaan pelabuhan perikanan akan bisa membuka lapangan pekerjaan seperti nelayan, penjual ikan, industri pengolahan ikan, dan jasa-jasa lain yang terkait.

2.2.3. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Lubis dan Nurul (2011) mengemukakan bahwa fasilitas sangat berperan dalam menunjang aktivitas di pelabuhan perikanan. Ketidacukupan kapasitasnya, ketidaktersediaan salah satu fasilitas yang diperlukan dan tata letaknya yang tidak mendukung akan dapat menghambat kelancaran berbagai aktivitas di pelabuhan. Fasilitas diperlukan mulai saat persiapan kegiatan operasi penangkapan ikan sampai saat hasil tangkapan didaratkan dan dipasarkan. Belum lengkapnya fasilitas yang memadai akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi pelabuhan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006, fasilitas di pelabuhan perikanan dibedakan menjadi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas pokok meliputi :

- a. Pelindung seperti breakwater, revetment, dan groin dalam hal secara teknis diperlukan;
- b. Tambat seperti dermaga dan jetty;

- c. Perairan seperti kolam dan alur pelayaran;
- d. Penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan;
- e. Lahan pelabuhan perikanan.

2. Fasilitas fungsional meliputi:

- a. Pemasaran hasil perikanan seperti tempat pelelangan ikan (TPI);
- b. Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas.
- c. Suplai air bersih, es, dan listrik;
- d. Pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel, dan tempat perbaikan jaring;
- e. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
- f. Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan;
- g. Transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan
- h. Pengolahan limbah seperti IPAL.

3. Fasilitas penunjang meliputi:

- a. Pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan;
- b. Pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;
- c. Sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;
- d. Kios IPTEK;
- e. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan (keselamatan pelayaran; kebersihan, keamanan, dan ketertiban; bea dan cukai; keimigrasian; pengawas perikanan; kesehatan masyarakat; dan karantina ikan.

2.2.4. Fungsi Pelabuhan Perikanan

Di dalam pasal 41 A UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dijelaskan bahwa fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. Pelayanan bongkar muat;
- c. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. Pemasaran dan distribusi ikan;
- e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
- f. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. Pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari dan/atau
- n. Pengendalian lingkungan.

Triatmodjo (2009) mengemukakan tata ruang pelabuhan perikanan dirumuskan berdasarkan pengelompokan jenis kegiatan sesuai dengan fungsi layanan dan jenis kegiatannya. Pengelompokan dimaksudkan untuk memberikan efisiensi gerak operasional di dalam pelabuhan maupun di kawasan sekitarnya. Pengelompokan kegiatan didasarkan pada fungsi layanan dan alur kegiatan.

Secara garis besar terdapat 3 kelompok kegiatan pelayanan, yakni pelayanan kapal, pelayanan hasil tangkapan ikan, dan pelayanan kegiatan manusia di dalam kawasan. Kelompok kegiatan tersebut dibedakan berdasar jenis dan spesifiknya di dalam satuan zonasi.

Zonasi kegiatan di dalam pelabuhan perikanan dibedakan menjadi 3 jenis fungsi pelayanan, ketiga fungsi layanan tersebut adalah fungsi layanan kapal, fungsi layanan hasil tangkapan, dan fungsi layanan manusia seperti Tabel 1:

Tabel 1. Zonasi Kegiatan dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fungsi Layanan		
Kapal	Hasil Tangkapan	Manusia
Zona kapal bongkar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok pelabuhan 2. Tambatan bongkar (kapal < 10 GT; kapal 10 – 30 GT; kapal > 30 GT) 3. Transit shed dan MCK 	Zona pelelangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sorting, cleaning, weighting 2. Tempat Pelelangan 3. Packing 4. Storing 5. Cold Storage 6. Loading ke atas truk 	Zona publik/umum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir kendaraan 2. Ruang transaksi 3. MCK umum 4. Terminal angkutan 5. Tempat untuk ibadah (Musholla) 6. Warung 7. Area wisata bahari 8. P3K
Zona tambat dan perbekalan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambatan istirahat 2. Tambatan muat 3. Tempat perbaikan jaring 4. Gudang es 5. Perbekalan melaut (es, air bersih, bekal, BBM) 	Zona tradisional: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik es 2. Gudang 3. Pengasinan 4. Pengasapan 5. Penjemuran 6. IPAL 	Zona administrasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor pelabuhan 2. Kantor syahbandar 3. Kantor satpolair 4. Balai pertemuan nelayan 5. KUD/koperasi mina 6. Gardu listrik/genset 7. Sumur/tangki air 8. Layanan BBM 9. Pemadam kebakaran
Zona reparasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Slipways dengan winch house 2. Repair workshop 3. Electronic & refrig Gudang peralatan berat 	Zona industri perikanan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan industri 2. Kawasan pergudangan 3. Kawasan Pemasaran 	Zona penunjang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah dinas 2. Mes penginapan 3. Restoran/kantin Poliklinik

(Triatmodjo, 2009)

2.2.5. Produk Pelabuhan Perikanan

Produksi perikanan tangkap umumnya sebagian besar dipasarkan di dalam negeri dalam bentuk produk segar dan olahan. Sedangkan sebagian lagi di ekspor. Pemasaran hasil perikanan tangkap meliputi ikan segar, ikan beku, ikan kering/asin, ikan pindang, ikan asap, dan ikan hasil olahan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dilakukan pemasaran antar kabupaten, sedangkan untuk kebutuhan luar daerah dilakukan pemasaran antar provinsi (Soesalit, 2013).

Peningkatan produksi tidak terbatas pada kuantitas saja tetapi juga harus memperhatikan kualitas hasil tangkapan. Jenis hasil tangkapan juga akan sangat berpengaruh sehingga akan mendongkrak harga jual hasil tangkapan yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan (Ginting, 2011).

2.3. Pelabuhan Perikanan Terhadap Perekonomian

Keberadaan pelabuhan perikanan diperlukan untuk memperlancar aktivitas perikanan tangkap mulai saat pendaratan sampai pada pemasarannya. Oleh karena itu keterpaduan antara fasilitas dan aktivitas di pelabuhan perikanan mutlak diperlukan guna memperoleh hasil yang optimal (Ginting, 2011).

Peranan pelabuhan sangat besar dalam upaya peningkatan SDM nelayan. Sementara peranan pelabuhan perikanan terhadap perekonomian negara sangat besar, sebab keikutsertaannya dalam menyumbangkan pendapatan baik kepada negara maupun kepada daerah yang bersangkutan (Martinus (2006) dalam Kurniawati (2011)).

2.4. Pendapatan Masyarakat

Masyarakat pesisir (nelayan) dapat dikelompokkan menjadi: (1) nelayan penangkap ikan (anak buah kapal dan pemilik), (2) petambak/pembudidaya, (3)

pengolah hasil laut, dan (4) pedagang hasil laut (Susilowati, 2004 dalam Hendratmoko, 2010). Sementara itu, sumber pendapatan rumah tangga nelayan berasal dari pendapatan melaut dan pendapatan non melaut. Pendapatan non melaut dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: pendapatan buruh perikanan, pendapatan *off fishing* sebagai pengolah atau perdagangan perikanan dan pendapatan non perikanan (Purwanti, 2010).

Pendapatan masyarakat bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup (David, 2014).

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan kepada pemerintah daerah dan mendanai pelaksanaan otonomi daerah dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Kebijakan keuangan yang tersentralisasi pada masa pemerintahan orde baru terbukti telah menciptakan disparitas penerimaan yang besar antara pusat dan daerah, bahkan antara daerah itu sendiri. Daerah yang memiliki sumber pendapatan keuangan yang besar tidak dapat mengelola sumber keuangannya secara mandiri dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kucuran dana dari

pusat untuk membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Desentralisasi keuangan tidak lain pada prinsipnya dimaksudkan sebagai cara bagi pemerintah daerah agar dapat, pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kedua meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Chalid, 2005).

Menurut Buku Panduan Keuangan Daerah (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangan PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah, antara lain: pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak balik nama, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain-lain. Pajak-Pajak daerah ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan pemerintah No. 65/2001 tentang pajak daerah.
2. Retribusi daerah, antara lain: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi biaya cetak kartu, retribusi pemakaman, retribusi parkir tepi jalan, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemadam kebakaran, dan lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan pemerintah No. 66/2001 tentang retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil deviden BUMD; dan
4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah Daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat (Dias, 2013).

Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sektor perikanan berlaku jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi tempat pelelangan dan retribusi pelayanan kepelabuhan, sedangkan untuk retribusi perizinan tertentu adalah retribusi usaha perikanan (Ratunnisa, 2011).

2.6. Penelitian Terdahulu

Menurut Marlon *et al* (2005), dalam penelitiannya mengatakan bahwa kata kunci dari pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir adalah kebijakan kelembagaan. Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir aspek kelembagaan memegang peranan penting, karena kelembagaan ini yang menggerakkan roda perekonomian yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia. Salah satu kajian penting dalam aspek kelembagaan adalah apakah peraturan-peraturan yang ada mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti pengendalian penangkapan, konflik antar nelayan, konversi lahan mangrove, tumpang tindih penggunaan lahan, kurangnya peran serta masyarakat dan adanya kondisi musim penangkapan dan musim paceklik di wilayah pesisir. Kata kunci kedua dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan wilayah pesisir adalah

peran serta masyarakat. Berhasilnya program-program di bidang pengelolaan wilayah pesisir tergantung kepada peran serta masyarakat itu sendiri.

Resmi (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dengan adanya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Salah satunya akan membuka beberapa peluang usaha yang bisa dijalankan oleh masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan, seperti usaha penangkapan, pengolahan ikan, perdagangan ikan segar, dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan perikanan. Untuk mengetahui manfaat ekonomi secara lebih terperinci maka dilakukan analisis finansial jangka pendek yang terdiri dari modal usaha, biaya produksi, penerimaan, *revenue cost (RC Ratio)*, keuntungan, rentabilitas, dan *Break Event Point (BEP)* baik atas dasar unit maupun sales dalam rupiah.

Dzulfikar (2011) menyatakan hasil penerimaan PAD sektor perikanan berasal dari retribusi izin usaha perikanan, dimana obyek dari retribusi adalah pemberian izin terhadap semua jenis kegiatan usaha perikanan. Retribusi izin usaha perikanan dan kelautan terdiri dari:

1. Untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu motor tempel dengan alat tangkap purse seine, payang dan sejenisnya, dogol/cantrang dan sejenisnya, jarring/gill net dan sejenisnya, pancing/long line dan sejenisnya, kapal/perahu pengangkut ikan.
2. Untuk kegiatan pembudidaya ikan:
 - a. Pembenihan udang
 - b. Pembenihan ikan
 - c. Pembenihan lainnya (kerang-kerangan, ikan air laut, katak, siput)
 - d. Budidaya ikan semiintensif di air tawar/payau.

- e. Budidaya ikan/rumput laut.
- f. Budidaya ikan intensif di air tawar/payau.

3. Untuk kegiatan pengolahan ikan (tradisional, semi modern, dan modern).
4. Untuk kegiatan eksploitasi.
5. Untuk kegiatan eksplorasi.
6. Pemasangan rumpon di laut.
7. Peredaran hasil perikanan.

2.7. Kerangka Berpikir

Dengan wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah perairan, maka tentunya sektor perikanan sangat potensial untuk menjadi andalan Indonesia di dalam usaha meningkatkan perekonomiannya. Sektor perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor perikanan budidaya diolah oleh kelompok tani/pembudidaya, sedangkan perikanan tangkap diolah oleh nelayan di dalam naungan suatu pelabuhan perikanan jadi pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan agar potensi yang ada tidak menjadi potensi yang terbuang.

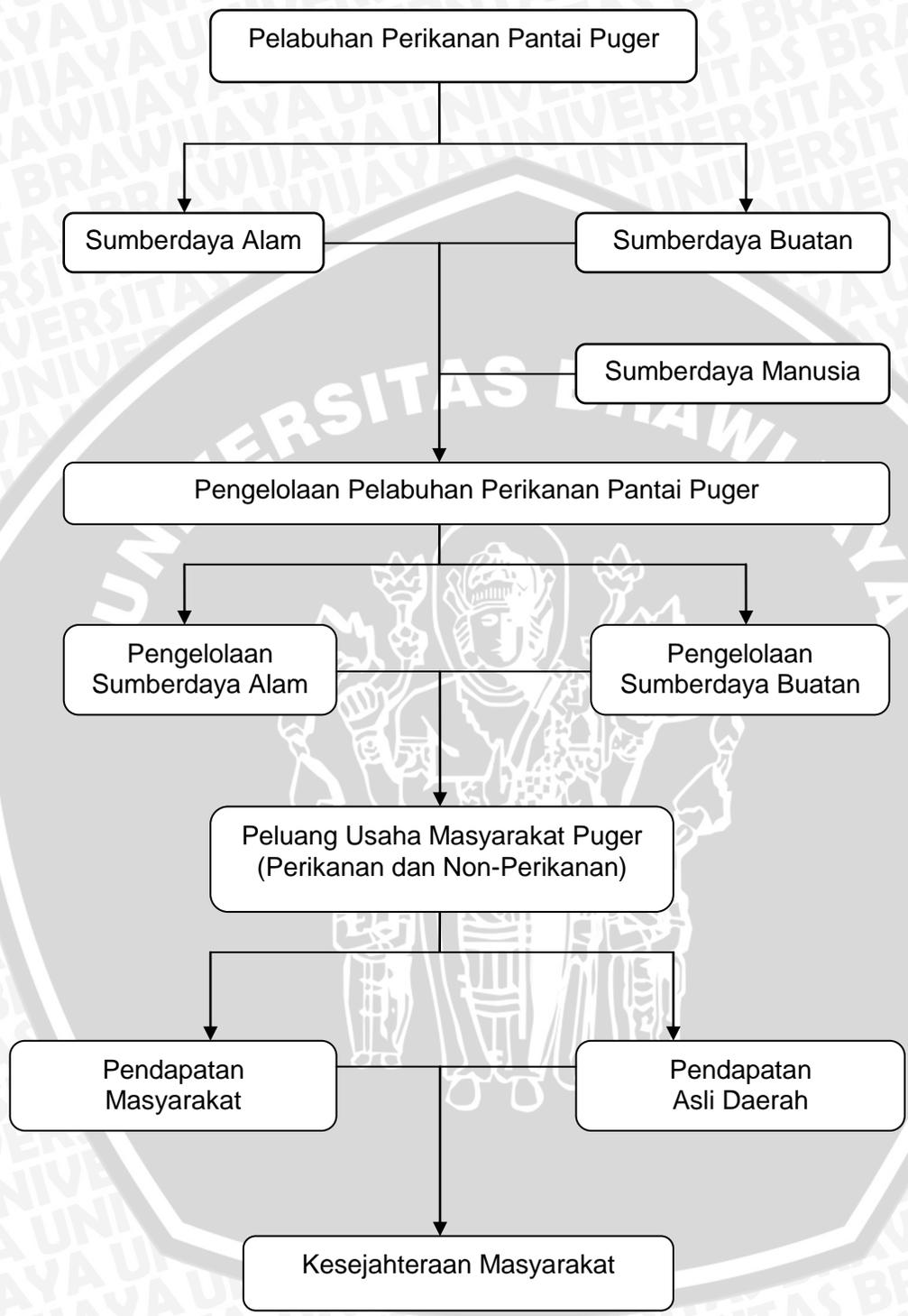
Salah satu kawasan pantai yang memberikan sumbangan terbesar dalam produksi perikanan, yaitu pantai utara-selatan Jawa. Kawasan pantai ini pada umumnya dimanfaatkan untuk areal penangkapan ikan, transportasi laut, pelestarian alam, budidaya laut, budidaya tambak, pariwisata, dan permukiman nelayan (Pramono, 2010).

Pantai Puger yang berada di wilayah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan yang selama ini dikenal sebagai pendaratan ikan yang cukup besar di Kabupaten Jember. Potensi sumberdaya perikanan (SDA) yang ada di kawasan ini berupa sumberdaya ikan tongkol, tuna, cakalang, tenggiri,

cucut, cumi-cumi, dan berbagai macam udang. Sedangkan untuk fasilitas-fasilitas (SDB) yang ada di UPPPP Puger diantaranya jasa/sewa pemakaian (tanah, bangunan, warung/kios), jasa pemakaian peralatan penangkapan ikan, pemeliharaan dan perbaikan kapal, bongkar muat ikan, penitipan kendaraan roda dua dan roda empat, perbekalan melaut, dsb.

Potensi yang sangat menjanjikan tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang tepat agar bisa memberikan manfaat yang lebih terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain peran aktif pemerintah dalam melakukan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, peran serta masyarakat yang berhubungan langsung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger juga sangat dibutuhkan demi terjaga dan termanfaatkannya potensi-potensi yang terdapat di dalamnya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger diantaranya memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan tanggung jawab, memanfaatkan dan merawat fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dan juga untuk menawarkan jasa-jasa lainnya yang masih berada di dalam lingkup Pelabuhan Perikanan Pantai Puger. Dengan pengelolaan seperti itu, bisa memunculkan peluang usaha yang bisa dijalankan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, sehingga selain menjaga sumberdaya yang ada kegiatan tersebut juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Lebih jauh lagi, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger akan memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Untuk bentuk sederhana dari kerangka berpikir penelitian ini disediakan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yang dikelola oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Puger (UPPPP Puger), Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan waktu pelaksanaannya pada Bulan September 2014.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode survey. Menurut Mardalis (1999), penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi.

Donald *et al* (1985) dalam Arikunto (2009) menyatakan bahwa survei dapat dilakukan untuk sesuatu hal data yang sifatnya nyata (*tangible*) misalnya: berapa banyak siswa yang pergi sekolah dengan bersepeda, dan berapa jumlah rata-rata orang sakit demam berdarah dalam setiap tahun, survei tentang sikap penduduk terhadap satu kebijakan pemerintah, survei untuk mengetahui pendapat masyarakat, dan sebagainya. Selain itu, menurut Wardiyanta (2006), pendekatan survey menunjuk pada teknik kuesioner, yakni mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan pada responden baik secara lisan maupun tertulis. Metode ini meliputi survei-survei keadaan, survei pendapat, atau survei interpretasi, yang semuanya

dapat dilakukan dengan teknik wawancara pribadi, dengan surat, dengan telepon, atau dengan bantuan alat elektronik.

Metode survey pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai skala usaha yang dijalankan oleh masyarakat di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dengan melihat aspek finansial usaha yang meliputi modal, biaya total, penerimaan, dan keuntungan masing-masing pelaku usaha.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam suatu penelitian ada jenis-jenis data yang digunakan, sementara itu untuk penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber.

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni yang asli, informasi dari tangan pertama atau responden. Untuk mengumpulkan data primer, diperlukan penghayatan peneliti terhadap obyek yang diteliti, terutama untuk memperoleh informasi yang bersifat kualitatif yang menjadi latar belakang data kuantitatif. Cara yang paling banyak digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah metode survei. Metode lain yang digunakan yakni metode observasi dan eksperimental meskipun tidak sesering metode survei (Wardiyanta, 2006)

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari responden melalui teknik wawancara, kuesioner, selain itu untuk memahami kondisi lapang dilakukan observasi lapang secara langsung oleh peneliti. Sumber data primer berasal dari pelaku usaha di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dan juga instansi pemerintah yang terkait di dalamnya. Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Data mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat setempat sebagai *multiplier effects* dari adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.
2. Data mengenai inventarisasi kegiatan ekonomi di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, tetapi dari pihak ketiga. Penggunaan data sekunder dalam sebuah penelitian bukanlah tanpa kelemahan karena banyak informasi dari pihak ketiga tidak memenuhi apa yang diperlukan. Masalah lain adalah pemborosan waktu atau data sekunder yang sudah kadaluarsa. Misalnya, sensus penduduk yang dibuat setiap 10 tahun sekali, jika peneliti hanya mendapatkan data yang terakhir, data itu tidak akan banyak membantu (Wardiyanta, 2006).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dan dokumentasi dari dokumen-dokumen dari instansi yang terkait (Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, Badan Pusat Statistik dalam lingkup Kecamatan Puger, Kabupaten Jember). Dalam pelaksanaan penelitian ini yang termasuk ke dalam data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data kondisi sosial dan budaya penduduk setempat antara lain tingkat pendidikan, mata pencaharian, umur atau usia, agama, dsb.
2. Data mengenai profil UPPPP Puger.
3. Data mengenai kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti pada umumnya, dalam pelaksanaan penelitian pengumpulan data dapat dilakukan dengan beragam cara baik melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi.

- Observasi, teknik pengambilan data yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan respon dari responden, dalam kondisi ini peneliti mengamati kegiatan-kegiatan subjek atau kondisi alamiah suatu objek tanpa berusaha memunculkan respon dari siapapun. Melalui penelaahan diharapkan peneliti memperoleh informasi yang berguna untuk penelitiannya tanpa dipengaruhi oleh sifat subjektif responden atau peneliti itu sendiri (Zulganef, 2008). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui observasi meliputi kondisi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger meliputi kondisi fasilitas pelabuhan, kegiatan pelaku usaha di dalam pelabuhan, dan kegiatan pelayanan UPPPP Puger kepada masyarakat pelabuhan.
- Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, merangsang, responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya (Singarimbun (1989) dalam Zulganef (2008)). Data yang dikumpulkan melalui wawancara meliputi pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger secara umum dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Angket (kuesioner) merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia

memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna. Orang yang diharapkan memberikan respons ini disebut responden (Arikunto, 2009). Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data tentang rata-rata perhitungan finansial setiap usaha yang ada di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

- Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen/catatan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan valid maka peneliti harus mengevaluasi data sekunder yang sudah didapatkan (Wardiyanta, 2006). Melalui teknik pengumpulan data secara dokumentasi, data yang bisa didapatkan yaitu data kondisi umum lokasi penelitian (geografis, topografis, dan demografis), data inventarisasi fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, data produksi hasil tangkapan, jumlah armada, dan jumlah serta jenis alat tangkap yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

3.5. Metode Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus (Sabar, 2007). Populasi yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah masyarakat di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger meliputi pegawai UPPPP Puger dan pelaku usaha di dalamnya baik usaha di bidang perikanan maupun usaha di luar bidang perikanan. Untuk menyederhanakan penelitian dilakukan pengambilan sampel dari populasi. Sabar (2007) menyatakan sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan sampel penelitian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dibuat dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, dengan demikian penelitian akan berjalan lebih terarah, tidak menghabiskan banyak waktu, serta informasi-informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam metodologi penelitian, teknik seperti ini disebut teknik *purposive sampling*.

Menurut Margono (2004), teknik *purposive sampling* merupakan pemilihan subjek yang didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungkan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Kriteria yang ditetapkan untuk sampel pertama yaitu sampel memiliki pengetahuan yang luas tentang permasalahan dan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, nilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan kriteria seperti itu, maka sampel yang paling representatif untuk mewakili populasi adalah Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger dan 2 petugas lapang dari pihak UPPPP Puger yang lebih intensif berhubungan langsung dengan masyarakat pelabuhan. Selain itu, untuk mendapatkan informasi lebih mengenai pengelolaan fasilitas TPI Puger ditentukan sampel penelitian dengan kriteria mengetahui pelaksanaan pelelangan di TPI Puger dan pemasukan serta permasalahan-permasalahan yang dialami oleh TPI, dengan demikian maka sampel yang dipilih adalah Kepala TPI Puger.

Untuk penentuan sampel dari pelaku usaha dibagi menjadi 8 kriteria karena dalam penelitian ini diambil 8 jenis pelaku usaha baik usaha yang terkait perikanan

meliputi usaha penangkapan, usaha pengepakan, usaha pengolahan, usaha penjualan ikan segar, dan usaha penjualan produk olahan maupun usaha non-perikanan yang terdiri dari jasa penjaga toilet, jasa transportasi Pulau Kucur, dan usaha makanan (bakso dan es degan). Sebelumnya menentukan kriteria yang lebih spesifik untuk setiap jenis usaha, perlu diketahui bahwa rata-rata skala usaha yang dijalankan oleh setiap jenis usaha adalah sama. Penentuan sampel dari pelaku usaha penangkapan didasarkan pada kriteria bahwa sampel harus mengetahui seluruh aspek usaha yang dijalankan terutama pada aspek finansial mulai dari sebelum melakukan penangkapan sampai setelahnya termasuk pendapatan yang diterima oleh nelayan ABK. Aspek finansial diutamakan karena aspek ini berhubungan dengan data tentang rata-rata pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka sampel yang paling memenuhinya adalah nelayan juragan dengan total sebanyak 15 sampel yang mewakili tiga jenis nelayan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yaitu nelayan jukung, nelayan sekoci, dan nelayan payang.

Kriteria sampel ketiga untuk pelaku usaha pengepakan, karena jumlah di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sedikit dan skala usaha yang dijalankan hampir sama maka dari usaha pengepakan diambil sebanyak 1 sampel yang bisa mewakili keseluruhan pelaku usaha pengepakan. Kriteria sampel keempat untuk pelaku usaha pengolahan produk perikanan dipilih dari pelaku usaha pengolahan yang produknya paling banyak dijumpai/dijajakan oleh penjual di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, yaitu ikan asin dan terasi yang menjadi produk olahan utama, jumlah sampel yang diambil sebanyak 4 sampel.

Kriteria kelima ditujukan untuk pelaku usaha penjualan ikan segar dan produk olahan, setelah dilakukan survey awal maka diputuskan kriteria untuk pelaku usaha

tersebut diambil dari pelaku usaha yang memiliki kapasitas usaha tinggi, sedang, dan rendah. Penentuan tinggi rendahnya kapasitas usaha tersebut berdasarkan pada peralatan yang digunakan sebagai faktor produksi seperti kondisi kios dan kelengkapan peralatan usaha, selain itu juga didasarkan pada jumlah produk yang diperjualbelikan. Dengan demikian, jumlah sampel dari pelaku usaha penjualan produk perikanan ditentukan sebanyak 10 sampel. Kriteria keenam untuk penentuan sampel dari penyedia jasa transportasi Pulau Kucur, kriteria yang diperhatikan adalah skala usaha yang dijalankan hampir sama dapat dilihat dari penggunaan kapal jukung oleh semua pelaku usaha ini dan karena jumlahnya yang tidak tentu setiap harinya maka dari penyedia jasa transportasi Pulau Kucur ditentukan jumlah sampel sebanyak 3 sampel untuk mengetahui rata-rata tingkat pendapatan mereka per harinya. Sampel dari penjaga toilet diambil keseluruhan karena jumlahnya yang hanya ada 2 orang. Sedangkan untuk pelaku usaha warung yang diwakili oleh pelaku usaha penjualan bakso dan es degan dipilih 2 orang, karena jumlah pastinya tidak diketahui.

Dari penjabaran penentuan sampel secara *purposive sampling* tersebut di atas maka secara keseluruhan sampel yang diambil dalam pelaksanaan penelitian ini sebanyak 41 sampel secara lebih sederhana bisa dilihat dalam bentuk Tabel 2:

Tabel 2. Sampel Penelitian

No.	Sampel Penelitian	Jumlah Sampel Penelitian
1.	UPPPP Puger, terdiri dari: a. Kepala UPPPP Puger b. Petugas Lapang UPPPP Puger c. Kepala TPI Puger	1 2 1
2.	Usaha Penangkapan, terdiri dari: a. Kapal Jukung b. Kapal Sekoci c. Kapal Payang	5 5 5
3.	Usaha Pengepakan	1

4.	Usaha Pengolahan, terdiri dari: a. Pengolahan Ikan Asin b. Pengolahan Terasi	2 2
5.	Usaha Penjualan, terdiri dari: a. Penjualan Ikan Segar b. Penjualan Produk Olahan	5 5
6.	Jasa Non-Perikanan, terdiri dari: a. Jasa Penjaga Toilet b. Jasa Pulau Kucur c. Warung (Bakso dan Es Degan)	2 3 2
Total Sampel Penelitian		41

3.6. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap yang penting di dalam sebuah penelitian, dengan melakukan analisa data maka tujuan penelitian akan tercapai. Data-data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan kepada orang lain.

Pada penelitian deskriptif ini akan digunakan analisa kualitatif dan juga analisa kuantitatif. Menurut Arikunto (1998), analisa data dalam penelitian deskriptif ialah apabila data telah terkumpul lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Berikutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, hasil pengukurannya dapat diproses dengan berbagai cara, yaitu:

- Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh prosentase.
- Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan susunan urut data untuk selanjutnya dibuat tabel, maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan atau untuk kepentingan visualisasi datanya.

3.6.1. Analisa Data Kualitatif

Pada penelitian ini, analisa data kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Profil Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yang meliputi lokasi, fungsi, inventarisasi fasilitas baik pokok, fungsional, maupun penunjang serta perkembangannya.
2. Pelaksanaan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.
3. Peluang-peluang usaha di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yang muncul sebagai *multiplier effects* dari adanya Pelabuhan Perikanan tersebut.

Untuk bisa menyajikan ketiga hal tersebut menjadi sebuah informasi yang bisa dipahami oleh pembaca, maka perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam analisa data kualitatif. Menurut Sanapiah (1990), tahapan-tahapan analisa data kualitatif adalah:

- a. Pengumpulan Data. Tahap dimana peneliti melakukan pengumpulan data baik data-data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian yang sudah ditentukan.
- b. Reduksi data. Proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang terdapat di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, menyortir dan mengorganisasikan data.
- c. Penyajian data. Proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
- d. Menarik kesimpulan dan verifikasi. Merupakan akhir dari kegiatan analisis berupa penarikan kesimpulan dengan cara meninjau ulang data-data yang diperoleh di lapangan agar data tersebut valid.

3.6.2. Analisa Data Kuantitatif

3.6.2.1. Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Analisa data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pelabuhan perikanan Puger setelah dilakukan identifikasi jenis usaha. Yang dimaksud analisis kegiatan ekonomi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha yang tersedia di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dan untuk menganalisis rata-rata tingkat pendapatan dan keuntungan yang bisa dicapai oleh masing-masing usaha dalam periode waktu tertentu dengan memperhatikan investasi usaha, biaya-biaya produksi, kuantitas produksi serta harga dari produk yang dihasilkan.

Untuk membantu dalam pelaksanaan analisa data secara kuantitatif, dilakukan perhitungan-perhitungan finansial terhadap usaha yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yang meliputi:

a) Modal Usaha

Setiap akan menjalankan sebuah usaha, tentunya pelaku usaha membutuhkan modal yang disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan. Menurut Riyanto (1995) dalam pengertian ekonomi, modal usaha adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja bekerja untuk menghasilkan suatu barang baru.

b) Biaya Produksi

Menurut Riyanto (1995), biaya total adalah keseluruhan biaya yang terjadi pada produksi jangka pendek. Biaya total produksi didapatkan dari keseluruhan biaya tetap dan keseluruhan biaya variabel. Rumus dari biaya total adalah sebagai berikut:

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana :

TC = Total Cost (Biaya Produksi Total)

TFC = Total Fix Cost (Biaya Tetap Total)

TVC = Total Variabel Cost (Biaya Variabel Total)

c) Penerimaan

Soekartawi (1993) dalam Prasetya (2014) penerimaan adalah nilai total produksi yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dimana besar penerimaan tergantung pada harga dan jumlah produk. Untuk menghitung total penerimaan suatu usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TR = P \times Q$$

TR = Total Revenue (Total Penerimaan)

P = Harga Jual Per Unit

Q = Kuantitas Hasil Produksi

d) Keuntungan

Keuntungan usaha atau pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap (Primyastanto dan Istikhoroh, 2006). Untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan, maka digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Dimana:

π = Keuntungan

TC = Total Cost (Total Biaya)

TR = Total Revenue (Total Penerimaan)

3.6.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain untuk menganalisis kegiatan ekonomi masyarakat, analisis deskriptif kuantitatif juga dilakukan untuk menganalisis persentase kontribusi PPP Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PPP Puger (\%)} = \frac{\text{Pemasukan PPP Puger (Rp)}}{\text{PAD Jawa Timur}} \times 100\%$$

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan khususnya dari Pelabuhan Perikanan berasal dari retribusi izin usaha perikanan, dimana obyek dari retribusi adalah pemberian izin terhadap semua jenis kegiatan usaha perikanan. Retribusi izin usaha perikanan dan kelautan terdiri dari:

1. Untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu motor tempel dengan alat tangkap purse seine, payang dan sejenisnya, dogol/cantrang dan sejenisnya, jaring/gill net dan sejenisnya, pancing/long line dan sejenisnya, kapal/perahu pengangkut ikan.
2. Untuk kegiatan pengolahan ikan.
3. Peredaran hasil perikanan.
4. Sewa lahan dan bangunan yang ada di dalam pelabuhan perikanan.

3.7. Batasan Masalah Penelitian dan Definisi Operasional

3.7.1. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian yang sedang dijalankan. Obyek penelitian ini adalah kondisi Pelabuhan Perikanan

Pantai Puger, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger, dan pelaku usaha baik usaha terkait maupun tidak terkait dengan perikanan yang ada di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

3.7.2. Definisi Operasional

Definisi Operasional pada penelitian tentang “Manfaat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi profil (lokasi, tugas, armada, jumlah tangkapan), pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, manfaatnya bagi kegiatan ekonomi masyarakat setempat, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Konsep pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya pelabuhan perikanan meliputi sumberdaya perikanan, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia yang terlibat kegiatan di dalamnya.
- c. Kegiatan ekonomi masyarakat adalah jenis-jenis usaha masyarakat baik di bidang perikanan maupun di luar bidang perikanan sebagai sumber pendapatan/keuntungan di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.
- d. Usaha-usaha yang terdapat di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, seperti usaha penangkapan, usaha pemasaran hasil perikanan, usaha pengepakan, usaha pengolahan, usaha makanan, dan usaha penyedia jasa lainnya dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger (penjaga MCK, manol, dan jasa transportasi Pulau Kucur).

- e. Kontribusi UPPPP Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur didapatkan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pemasukan yang didapatkan UPPPP Puger termasuk di dalam Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari PAD Jawa Timur.
- f. Sementara untuk PAD Kabupaten Jember didapatkan dari retribusi tempat pelelangan dan retribusi izin usaha perikanan tangkap.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Puger

Puger adalah sebuah wilayah pemerintahan kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan Puger sendiri berada di daerah pesisir pantai selatan Samudera Indonesia. Secara historis nama kawasan Puger sudah ada sekitar abad 16 sampai dengan abad 18 Masehi. Kecamatan Puger mempunyai luas wilayah 148,99 km² atau 4,52% dari luas Kabupaten Jember. Secara astronomis, Kecamatan Puger terletak 8°19'49,28"S dan 113°27'50,90"T. Sedangkan untuk batas-batas wilayah dari Kecamatan Puger adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Balung
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wuluhan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gumukmas

Secara administratif, Kecamatan Puger terbagi menjadi 12 Desa, yaitu Desa Puger Kulon, Puger Wetan, Mojosari, Mojomulyo, Grenden, Kasiyan, Kasiyan Timur, Wonosari, Jambearum, Mlokorejo, Wringintelu, dan Bagon.

4.2. Data Kependudukan

4.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pada jenis kelamin penduduk Kecamatan Puger terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 58.536 jiwa dan jumlah perempuan 58.985 jiwa dengan total penduduk sebanyak 117.521 jiwa. Untuk lebih rinci mengenai jumlah penduduk

yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kecamatan Puger yang tersebar di 12 desa, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Desa	Jumlah Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah Perempuan (Jiwa)
1.	Puger Kulon	7.436	7.292
2.	Puger Wetan	5.205	5.182
3.	Mojosari	4.846	4.899
4.	Mojomulyo	4.150	4.216
5.	Grenden	7.439	7.487
6.	Kasiyan	3.900	3.845
7.	Kasiyan Timur	6.406	6.590
8.	Wonosari	4.322	4.413
9.	Jambearum	3.500	3.731
10.	Mlokorejo	5.344	5.210
11.	Wringintelu	3.119	3.187
12.	Bagon	2.869	2.933

(Sumber : Monografi Kec. Puger, 2013)

4.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Puger, maka kelompok penduduk di Kecamatan Puger dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok penduduk beragama Islam, kelompok penduduk beragama Kristen, kelompok penduduk beragama Katolik, kelompok penduduk beragama Hindu, dan kelompok penduduk beragama Budha. Data yang lebih rinci disediakan dalam bentuk Tabel 4:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	116.734
2.	Kristen	562

3.	Katolik	213
4.	Hindu	3
5.	Budha	9

(Sumber : Monografi Kec. Puger, 2013)

4.2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan pada jenis mata pencaharian, kelompok penduduk di Kecamatan Puger dibedakan menjadi 9 kelompok, yaitu pertanian; pertambangan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa lainnya. Untuk lebih rinci, data disediakan dalam bentuk Tabel 5:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)
1.	Pertanian/Perikanan	26.693
2.	Pertambangan	778
3.	Industri Pengolahan	3.228
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	101
5.	Bangunan	1.558
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8.158
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2.059
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	133
9.	Jasa-Jasa	5.663

(Sumber : Monografi Kec. Puger, 2013)

4.3. Kondisi Kesejahteraan Penduduk

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Puger dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang berarti. Potensi alam dengan dataran ngarai yang subur, mempunyai wilayah pesisir menjadikan salah satu potensi Kecamatan Puger yaitu pertanian termasuk perikanan laut dengan tersedianya Tempat Pelelangan

ikan (TPI). Sektor pertanian merupakan *leading sector* yang memiliki peranan yang cukup besar sekitar 46,70% atau sekitar Rp 1.021,41 dari total nilai tambah di tahun 2012. Diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 19,80% atau sebesar Rp 433,13 milyar dan sektor industri pengolahan sebesar 14,70% atau Rp 321,50 milyar. Sementara kontribusi terkecil sebesar 0,78% atau Rp 16,98 milyar adalah sektor listrik dan air (Monografi Kec. Puger, 2013).

4.4. Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi alam berupa hamparan pegunungan yang berbatasan dengan lautan, sehingga menjadi kelebihan khususnya berkaitan dengan sektor pariwisata, serta potensi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perindustrian, kehutanan, peternakan, pertambangan, dan perdagangan. Berdasarkan data statistik produksi ikan laut wilayah Kabupaten Jember tahun 2012 mencapai 8.138,3 ton dengan nilai sebesar Rp 29.349.270.000,00. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan produksi menjadi 8.191,2 ton dengan nilai sebesar Rp 33.936.030.000,00.

Kecamatan Puger dengan jumlah nelayan sebanyak 13.187 orang dan perahu sebanyak 2.410 buah mampu menghasilkan produksi pengolahan ikan kering (931,7 ton), ikan pindang (3.024,4 ton), asapan (307,5 ton), terasi (26,8 ton), kerupuk ikan (106 ton), dan tepung ikan (7,5 ton). Secara administratif, wilayah Kecamatan Puger yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, pengolah ikan, dan pedagang ikan adalah wilayah Desa Puger Wetan (4.975 jiwa) dan Desa Puger Kulon (6.055 jiwa). Sedangkan lahan berpotensi untuk dikembangkan untuk budidaya, pembenihan, dan produksi perikanan seluas 4.023 Ha, dan lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut seluas 136,23 Ha.

Sektor pariwisata yang dapat dikembangkan berada di wilayah Desa Puger Kulon (wisata ikan hasil laut TPI, Pantai Pancer, Nusa Barong) dan Puger Wetan, Mojosari (Pantai Tendas), dan Mojomulyo (Wisata Pantai Getem). Untuk sektor pertanian areal persawahan yang berpotensi untuk produksi komoditi padi seluas 7.685 Ha dengan hasil produksi mencapai 50.606,4 ton. Jagung seluas 6.704 Ha dengan hasil produksi 55.425,5 ton. Kedelai 87 Ha dengan hasil produksi 86,9 ton, kacang tanah seluas 15 Ha dengan hasil produksi 21,4 ton, kacang hijau seluas 117 Ha hasil produksi 113,4 ton, ubi kayu seluas 30 Ha dengan hasil produksi 312 ton, hasil sayuran (jenis terong, kubis, ketimun, kacang panjang, dan cabe) sebanyak 1.182 kuintal, jenis buah-buahan (rambutan, pisang, mangga, semangka, dan jeruk) sebanyak 30.052,7 kuintal.

Sektor perkebunan luas areal tanaman perkebunan rakyat menurut desa dan jenis tanaman (kelapa, tebu, tembakau) 736,7 Ha dengan hasil produksi kelapa 2.721.600 butir, tebu 5.303,5 kuintal, dan tembakau 822,7 kuintal. Sektor kehutanan luas areal dan tanaman kehutanan menurut desa dan jenis tanaman Jati 61,23 Ha, Bambu 48,8 Ha dengan hasil produksi 750 m³, untuk jenis tanaman lainnya 33,0 Ha dengan hasil produksi 0. Sektor peternakan jumlah ternak besar menurut desa dan jenis ternak sapi 10.757 ekor, kerbau 0, kuda 5 ekor. Jumlah ternak kecil menurut desa dan jenis ternak kambing 2.362 ekor, domba 2.354 ekor. Jumlah ternak unggas menurut desa dan jenis ternak ayam petelur 56.100 ekor, ayam pedaging 34.630 ekor, itik 38.792 ekor. Sektor industry dan pertambangan komoditas industri unggulan menurut desa ikan pindang 3.020 kuintal, terasi 17,6 kuintal, gamping 1.558.488 ton. Untuk jenis galian C pasir berada di wilayah Desa Mojosari dan Mojomulyo, sedangkan untuk galian B berada di kawasan Desa Grenden, Desa Puger Wetan, dan Desa Puger Kulon.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Profil Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terletak diantara Kecamatan Puger dan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, tepatnya pada pertemuan antara muara sungai Bedadung dan sungai Besini. Secara astronomis posisinya terletak pada $113^{\circ}30'40''$ BT dan $08^{\circ}22'17''$ LS. Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis karena langsung berhadapan dengan Samudera Hindia yang dikenal memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis kecil maupun pelagis besar, kekayaan tersebut mendorong sebagian besar penduduk di sekitarnya menggantungkan mata pencahariannya pada bidang perikanan seperti penangkapan, pengolahan, dan pemasaran.

Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sendiri dikelola oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger. Sebelum berstatus sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai, Pelabuhan Perikanan Puger hanya berstatus sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tetapi dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2004 tentang peningkatan status Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung maka status Pelabuhan Perikanan Puger pun berubah menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai dan pengelolaan serta pemanfaatannya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selain hal tersebut di atas, dalam penelitian ini yang termasuk profil adalah mengenai tugas pokok, produksi hasil tangkapan, armada perikanan tangkap, alat

tangkap dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

5.1.1. Tugas Pokok UPPPP Puger

Sebagai sebuah tempat umum yang menampung banyak kegiatan masyarakat, UPPPP Puger memiliki tugas-tugas pokok agar apa yang dikerjakan lebih terfokus pada kegiatan perikanan di dalam area pelabuhan. Berdasarkan pada peraturan UPPPP Puger (2014), maka tugas pokok dari UPPPP Puger adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pusat kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat nelayan setempat.
2. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pusat pengembangan industri perikanan.
3. Sebagai sentra pengembangan masyarakat nelayan, pembinaan dan penyuluhan perikanan.

5.1.2. Produksi Hasil Tangkapan UPPPP Puger

Kawasan UPPPP Puger yang memiliki alur pelayaran yang bermuara dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dikenal memiliki potensi sumberdaya ikan pelagis kecil maupun ikan pelagis besar. Jenis ikan di UPPPP Puger antara lain adalah tongkol, tuna, teri, layur, cumi-cumi, cakalang, lemuru, dan sebagainya.

Sementara itu, untuk jumlah produksi hasil tangkapan UPPPP Puger pada tahun 2013 sebesar 2.240.000 Kg dengan nilai sebesar Rp 20.160.000.000,00. Jumlah produksi hasil tangkapan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dari tahun 2007 sampai tahun 2013 secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan baik

dari volumenya maupun nilai produksinya. Untuk lebih jelasnya, perkembangan mengenai volume dan nilai produksi hasil tangkapan UPPPP Puger disediakan dalam Tabel 6:

Tabel 6. Perkembangan Volume dan Nilai Produksi UPPPP Puger

TAHUN	VOLUME PRODUKSI (Kg)	NILAI PRODUKSI (Rp)
2007	1.870.827	5.296.901.050
2008	1.122.914	6.605.424.700
2009	1.184.615	6.242.746.300
2010	1.154.340	8.719.293.000
2011	1.804.595	14.823.712.000
2012	2.194.345	19.616.049.000
2013	2.240.000	20.160.000.000

(Sumber : UPPPP Puger, 2014)

5.1.3. Armada Perikanan Tangkap UPPPP Puger

Armada perikanan tangkap di UPPPP Puger pada tahun 2013 mencapai 1.235 unit dan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu 0-5 GT, 5-10 GT, dan 10-30 GT. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 armada perikanan tangkap di pelabuhan ini selalu mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan armada perikanan UPPPP Puger dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7. Perkembangan Armada Penangkapan UPPPP Puger

NO.	JENIS ARMADA	TAHUN						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	0 – 5 GT	310	315	315	450	459	459	492
2.	5 – 10 GT	94	94	94	315	317	317	346
3.	10 – 30 GT	243	260	260	351	364	364	397
TOTAL		874	899	899	1.116	1140	1140	1235

(Sumber : UPPPP Puger, 2014)

5.1.4. Alat Tangkap UPPPP Puger

Di dalam kawasan UPPPP Puger alat tangkap utama yang digunakan oleh masyarakat nelayan adalah payang, jaring, dan pancing. Pada tahun 2013 alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger mencapai 1.138 unit alat tangkap. Jumlah alat tangkap yang digunakan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, perkembangan alat tangkap yang digunakan nelayan Puger pada tahun 2007 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada Tabel 8:

Tabel 8. Perkembangan Alat Tangkap UPPPP Puger

NO.	ALAT TANGKAP	TAHUN						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Payang	198	204	205	210	360	360	399
2.	Jaring	344	351	351	351	320	320	331
3.	Pancing	208	222	222	310	458	458	479
TOTAL		750	777	778	871	1.138	1.138	1.209

(Sumber : UPPPP Puger, 2014)

5.1.5. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

Fasilitas merupakan input dari suatu pelabuhan, kondisi dari fasilitas berhubungan dengan kualitas dan kuantitasnya yang tersedia di pelabuhan perikanan. Keberadaan fasilitas-fasilitas di kawasan pelabuhan perikanan sangat penting, karena dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka kegiatan-kegiatan di kawasan pelabuhan perikanan bisa dilakukan dengan mudah dan bisa berjalan lebih lancar. Untuk mendapatkan output yang optimal dari fasilitas-fasilitas tersebut, dibutuhkan pengelolaan yang tepat dari pihak pengelola. Selain dari pihak pengelola, peran aktif masyarakat setempat dalam memanfaatkan dan merawatnya juga sangat dibutuhkan, mengingat masyarakat setempat merupakan kelompok

yang paling sering berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2006 yang menyebutkan bahwa fasilitas yang terdapat di dalam Pelabuhan Perikanan, termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai Puger ada tiga jenis, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Perincian fasilitas yang disediakan oleh pihak UPPPP Puger kepada masyarakat setempat adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok merupakan fasilitas yang harus ada di pelabuhan perikanan. Untuk fasilitas-fasilitas pokok yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dapat dilihat pada Tabel 9:

Tabel 9. Fasilitas Pokok UPPPP Puger

Fasilitas	Ukuran
Lahan	2,06 Ha
Break Water	270 m
Dermaga	360 m ²
Turap	420 m ²
Alur Masuk	P = 1000 m, L = 130 m
Bronjong	1360 m
Reklamasi Lahan	13.000 m ²
Groin	50 m

(Sumber : UPPPP Puger, 2014)

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak UPPPP Puger dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan dalam pelabuhan, khususnya kegiatan perikanan masyarakat bisa dijalankan dengan lebih mudah. Rincian fasilitas fungsional dapat dilihat pada Tabel 10:

Tabel 10. Fasilitas Fungsional UPPPP Puger

Fasilitas	Ukuran
Kantor UPPPP	180 m ²

Tempat Pelelangan Ikan Unit I	360 m ²
Tempat Pelelangan Ikan Unit II	360 m ²
Gedung pertemuan nelayan	175,5 m ²
Bengkel	145 m ²
Gudang es	150 m ²
Menara air	24 m ³
Instalasi air	30 ltr/menit
Instalasi listrik	10,6 KVA
TPS	22,5 m ³

Toilet/MCK I	140 m ²
Toilet/MCK II	18 m ²
Tempat pengolahan limbah	16,7 m ³
Areal Parkir	3000 m ²
Pagar Depan	250 m
Saluran Drainase	674 m
Los Pasar	126 m ²
Rumah Genset	50 m ²
Water treatment	16,7 m ²
SPDN	64 m ²
Dispenser BBM (solar)	1 unit
Tangki BBM (solar)	20 ton

(Sumber : UPPPP Puger, 2014)

c. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas-fasilitas yang berperan sebagai pendukung lancarnya kegiatan yang ada di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, seperti peribadatan, keamanan, dan sebagainya. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh UPPPP Puger dapat dilihat pada Tabel 11:

Tabel 11. Fasilitas Penunjang UPPPP Puger

Fasilitas	Ukuran
Mess Operator	36 m ²
Pos KAMLA TNI AL	45 m ²
Unit Sat POL AIR	45 m ²
Musholla	9 m ²
Outlet hasil olahan	36 m ²
Warung makan/kios (35 unit @ 9 m ²)	315 m ²
Tempat handling dan packing (4 unit @ 40 m ²)	160 m ²

(Sumber : UPPPP Puger, 2014)

5.2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

Secara teknis, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Puger merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khusus untuk fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Puger meskipun merupakan salah satu fasilitas yang berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger tetapi TPI Puger merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jember. Dengan demikian, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember adalah retribusi TPI Puger yang termasuk ke dalam retribusi daerah.

Sementara itu, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah pengelolaan terhadap sumber daya perikanan, pengelolaan terhadap lingkungan, pengelolaan terhadap sumberdaya manusia, pengelolaan aktivitas masyarakat, dan juga pengelolaan sumberdaya alam secara religius yang rutin dilakukan oleh masyarakat Puger.

5.2.1. Pengelolaan Terhadap Sumberdaya Perikanan

Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, tetapi dalam pemanfaatannya harus tetap memperhatikan kelestariannya. Di Pelabuhan Perikanan Pantai sering dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan alat tangkap. Meskipun sering dilakukan sosialisasi, masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran mengenai penggunaan alat tangkap seperti yang dikatakan oleh Bapak Arief sebagai kepala UPPPP Puger:

“Walaupun sudah dilakukan sosialisasi, disini masih ada pelanggaran. Jenis pelanggaran yang masih ditemui biasanya adalah mengenai ukuran mata jaring

yang tidak sesuai dengan peraturan, untuk ke depannya akan dikenakan sanksi tegas bagi mereka yang masih melakukan pelanggaran.”

Di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger diberlakukan kearifan lokal dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya perikanan yang ada dan untuk menghindari konflik antar nelayan. Kearifan lokal yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat telah membuat kesepakatan untuk tidak menggunakan alat tangkap purse seine karena purse seine merupakan alat tangkap yang bisa menangkap ikan dengan jumlah besar. Dengan menggunakan purse seine semua jenis ikan dengan berbagai ukuran bisa ditangkap, tentunya hal ini akan mengganggu kestabilan ekosistem laut dan juga dikhawatirkan akan membuat nelayan kecil mendapatkan hasil tangkapan yang lebih sedikit karena alat tangkap yang digunakan tidak bisa menyaingi alat tangkap purse seine.
2. Kesepakatan lain yang telah dibuat oleh masyarakat setempat adalah mengenai rumpon. Nelayan diperbolehkan memasang rumpon dengan syarat rumpon yang dipasang berjarak lebih kurang 30 - 40 Mil dari pulau terluar (Pulau Nusa Barong). Hal ini bertujuan untuk menghindarkan nelayan kecil dengan nelayan besar dari konflik karena jumlah tangkapan.

Selain diberlakukannya kearifan lokal, sebenarnya juga ada kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan oleh UPPPP Puger yang berkoordinasi dengan Sat POL AIR bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan agar sumberdaya ikan tidak dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, agar ketersediaannya tidak terancam dan menurunkan produksi perikanan dalam jangka panjang. Kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan alat tangkap yang digunakan yaitu harus sesuai dengan

peraturan yang diberlakukan, pemeriksaan ABK, pemeriksaan dokumen kapal ikan, dan sebagainya.

Tetapi pada kenyataannya kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya perikanan masih jauh dari harapan, sulitnya koordinasi antara pihak UPPPP Puger dengan SAT POL AIR menjadi kendala utama di dalam kegiatan ini. Seringkali pelanggaran-pelanggaran bahkan dilakukan oleh pihak berwajib sendiri, tentunya hal ini sangat mengundang keprihatinan mengingat sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang dalam pemanfaatannya harus penuh tanggung jawab. Saat ini pelanggaran yang masih sering berlangsung adalah penggunaan alat tangkap yang tidak disesuaikan dengan peraturan, pungutan liar, dan pencurian telur penyu.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai pengawasan sumberdaya perikanan pihak UPPPP Puger berencana akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun badan pengawas di bawah kendali UPPPP Puger sehingga koordinasi untuk menjaga sumberdaya perikanan bisa berjalan lebih baik.

5.2.2. Pengelolaan Terhadap Lingkungan

Pengelolaan terhadap lingkungan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sangat penting karena kondisi lingkungan akan berkaitan dengan kualitas produk perikanan dan kondisi kesehatan masyarakat. Pengelolaan lingkungan di Pelabuhan Perikanan dilakukan dengan kegiatan bersih lingkungan yang dilakukan oleh karyawan UPPPP Puger dan terkadang ada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan seperti ini. Kegiatan kebersihan lingkungan UPPPP Puger dilakukan setiap Hari Senin sampai Hari Kamis pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB. Pada Hari Jum'at juga dilakukan kegiatan bersih lingkungan, karena dicanangkan sebagai kegiatan Jum'at Bersih oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

5.2.3. Pengelolaan Terhadap Sumberdaya Manusia

Tersedianya potensi sumberdaya perikanan yang melimpah tidak akan berarti apa-apa jika tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal, maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan terhadap sumberdaya manusia sebagai subjek yang memanfaatkan potensi tersebut. Pengelolaan terhadap sumberdaya manusia biasanya dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pedagang ikan segar/olahan, dan pelaku ekonomi perikanan lainnya masih banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan modal, selain itu kemampuan masyarakat yang masih minim dalam menggunakan teknologi yang lebih efisien dan skala usaha yang masih kecil pada beberapa nelayan mendorong pihak pemerintah khususnya UPPPP Puger untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat yang secara rutin dilakukan setiap bulannya. Hal-hal yang sering dibahas di dalam kegiatan tersebut diantaranya masalah penggunaan alat tangkap sesuai Undang-Undang, perijinan usaha, sosialisasi mengenai program atau kebijakan yang akan dijalankan, dan penyampaian info mengenai kegiatan pelatihan nelayan.

Selain penyuluhan mengenai bidang perikanan yang masyarakat geluti, dengan bekerja sama dengan lembaga tertentu masyarakat juga diberikan penyuluhan mengenai program-program yang masih berhubungan dengan pekerjaan mereka. Salah satunya penyuluhan yang dilakukan oleh BPJS mengenai asuransi jiwa yang meliputi jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Sosialisasi di luar bidang perikanan seperti ini bertujuan agar nelayan juga memperhatikan faktor-faktor di luar perikanan yang juga masih berhubungan dengan pekerjaan yang mereka jalankan.

Kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal tanpa harus melanggar peraturan yang sudah diberlakukan dan dengan demikian pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan tangkap bisa lebih ditingkatkan. Suasana sosialisasi dan pengembangan masyarakat nelayan Puger dapat dilihat pada Gambar 2:



Gambar 2. Sosialisasi dan Pengembangan Nelayan

5.2.4. Pengelolaan Terhadap Aktivitas Masyarakat

Banyaknya masyarakat yang berkepentingan di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger mengharuskan adanya pengelolaan terhadap aktivitas mereka dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari adanya pelabuhan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah masyarakat nelayan, penjual produk perikanan, dan pengunjung pelabuhan, sedangkan aktivitas dari masyarakat itu sendiri meliputi tambat labuh kapal, pendaratan hasil tangkapan, perbekalan kapal perikanan, pelelangan ikan, penginformasian cuaca, penjualan produk perikanan, dan penitipan kendaraan bermotor.

a. Kegiatan Tambat Labuh Kapal Perikanan

Kegiatan tambat labuh kapal telah difungsikan dengan baik dan memberikan manfaat setelah dibangun talud yang dilengkapi dengan bordo kapal dan tangga untuk jalan bagi para nelayan/manol yang akan mendaratkan ikan ke TPI, dengan demikian pekerjaan yang mereka lakukan bisa lebih efektif dan efisien.

b. Kegiatan Pendaratan Hasil Tangkapan

Besarnya jumlah (kuantitas) dan ukuran kapal ikan di Puger merupakan kendala dalam optimalisasi kegiatan operasional fasilitas pokok (dermaga). Dermaga yang telah tersedia memberikan manfaat tetapi belum optimal karena ukurannya masih belum memadai apabila kapal melakukan pendaratan secara bersama-sama. Meski demikian kegiatan pendaratan ikan hasil tangkapan tidak mengalami kesulitan karena datangnya kapal nelayan bergantian jadi tidak mengalami penumpukan kapal di sekitar dermaga. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno sebagai pegawai (Petugas Lapang) UPPPP Puger:

“Disini banyak kapal yang melakukan pendaratan hasil tangkapan, tetapi hal tersebut tidak mengalami kendala karena pendaratan hasil tangkapan dilakukan secara bergantian, dan untuk kapal-kapal kecil biasanya juga langsung mendaratkan hasil tangkapan di sekitar Sungai Besini.”

c. Kegiatan Perbekalan Kapal Perikanan

Untuk melakukan kegiatan penangkapan, kapal perikanan tentunya membutuhkan perbekalan seperti bahan bakar, es, bahan makanan, dan keperluan perbekalan melaut yang lainnya. Untuk memenuhi perbekalan melaut nelayan tidak akan mengalami kesulitan karena terdapat fasilitas

fungsional yang berfungsi sebagai penyedia perbekalan melaut seperti kios, SPDN, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat fasilitas perbengkelan untuk memperbaiki kapal yang rusak.

d. Kegiatan Pelelangan Ikan Hasil Tangkapan

Untuk saat ini, Pelabuhan Perikanan Pantai Puger belum bisa menyelenggarakan fungsi TPI sebagaimana mestinya. Kegiatan pelelangan ikan untuk menentukan harga yang layak baik bagi nelayan maupun calon pembeli belum berjalan dengan baik, TPI hanya digunakan sebagai tempat jual beli biasa antara pengambek dan nelayan. Akar permasalahan dari tidak berfungsinya TPI Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah kesulitan permodalan yang dialami oleh nelayan. Sejauh ini untuk mengatasi masalah permodalan, nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger lebih memilih meminjam modal dari pengambek daripada koperasi maupun perbankan. Hal ini dikarenakan untuk meminjam ke pengambek nelayan tidak perlu memberikan jaminan berupa surat-surat berharga atau sesuatu berharga lainnya, yang diperlukan hanya kepercayaan antara pengambek dengan nelayan. Setelah mendapatkan hasil tangkapannya, sebagai balas jasa nelayan diharuskan menjualnya kepada pengambek yang sudah meminjamkan modal melaut. Harga hasil tangkapan secara keseluruhan ditentukan oleh pengambek dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar, sehingga hal ini merugikan bagi nelayan. Meskipun demikian, proses jual beli seperti ini sulit dihilangkan dari nelayan Puger.

e. Kegiatan Penginformasian Cuaca

Bagi nelayan yang melakukan aktivitasnya di laut informasi cuaca sangat penting bagi mereka, karena hal ini menyangkut keselamatan dalam

bekerja. Hal ini menjadi dasar bagi pihak UPPPP Puger untuk menyediakan pelayanan masyarakat berupa informasi cuaca. UPPPP Puger bekerja sama dengan BMKG Tanjung Perak Surabaya untuk mendapatkan info cuaca yang akan disampaikan kepada nelayan Puger. Selain bekerja sama dengan BMKG Tanjung Perak Surabaya, pihak UPPPP Puger juga mengakses info cuaca dari Australia yang juga mengamati cuaca di perairan Puger, mengingat di wilayah ini sering digunakan oleh peselancar baik domestik maupun asing untuk melakukan aktivitasnya. Informasi cuaca meliputi ketinggian gelombang, arah dan kecepatan angin, tingkat bahaya untuk melaut.

Untuk menginformasikan cuaca yang sedang terjadi, UPPPP Puger menggunakan isyarat bendera hitam. Jika cuaca sedang tidak memungkinkan bagi nelayan untuk melaut maka pihak UPPPP Puger akan mengibarkan bendera hitam di dermaga agar mudah terlihat oleh masyarakat setempat, setelah cuaca sudah kembali memungkinkan bendera hitam akan diturunkan. Walaupun sudah memberikan informasi mengenai cuaca yang ekstrem, sebagian nelayan akan mengabaikan informasi yang sudah diberikan dan tetap melakukan aktivitasnya untuk melaut dengan alasan demi memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak jarang ditemukan kasus kapal nelayan yang tenggelam di laut karena gelombang yang terlalu tinggi untuk kapal yang mereka gunakan.

f. Kegiatan Penjualan Ikan Segar dan Olahan

UPPPP Puger menyediakan outlet/kios untuk masyarakat yang ingin membuka usaha penjualan produk perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun dalam bentuk olahan. Produk ikan segar yang biasa dijual oleh

pedagang antara lain cumi-cumi, pari, tenggiri, teri, dan tongkol, sedangkan untuk produk olahan yang banyak dijual adalah produk olahan dalam bentuk terasi dan ikan asin. Seluruh pedagang disini mengadakan kesepakatan untuk penentuan harga produk perikanan yang dijual harus seragam untuk menghindari konflik antar pedagang.

Selain berdagang di outlet/kios, beberapa pedagang lainnya lebih memilih membuka lapak secara ilegal di sekitar TPI dengan alasan tempatnya lebih strategis. Meskipun ketika ada acara-acara penting lapak mereka terancam digusur, mereka tetap bertahan di lapak-lapak tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak UPPPP Puger berencana untuk menambah kios/outlet lagi dengan pertimbangan jika pedagang lapak disediakan kios/outlet lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger akan terlihat lebih bersih dan tertata rapi sehingga bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi. Dengan demikian penghasilan yang didapatkan oleh pedagang akan mengalami peningkatan dan juga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

g. Penitipan Kendaraan Bermotor

UPPPP Puger menyediakan jasa penitipan kendaraan baik roda dua maupun roda empat bagi masyarakat yang berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Puger untuk membeli produk-produk perikanan atau untuk sekedar menghabiskan waktu di Pulau Kucur sebagai obyek wisata di kawasan pelabuhan.

5.2.5. Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Religius

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, setiap tahunnya masyarakat Puger melakukan ritual khusus, ritual masyarakat Puger tersebut dikenal dengan nama Petik Laut, ada juga yang menyebutnya Larung Sesaji. Selain sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan sumber daya yang sudah diberikan di wilayah tersebut, diadakannya Petik Laut juga bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dikarenakan Samudera Indonesia (Segoro Kidul) terkenal dengan ombaknya yang sangat besar, sehingga tak jarang perahu nelayan terhempas ombak hingga karam. Plawangan/Pancer menjadi tempat yang berbahaya dilewati perahu nelayan karena sering terjadi perahu karam akibat diterpa ombak besar.

Ritual petik laut dilakukan dengan melarung sesaji ke laut. Ritual Petik Laut merupakan acara tahunan menjelang Bulan Syuro atau Muharam dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung baik itu yang berasal dari Jember ataupun di luar Jember, bahkan terkadang juga ada wisatawan asing yang ikut menyaksikan ritual Petik Laut dengan alasan ketertarikan secara pribadi terhadap kegiatan tersebut atau untuk keperluan peliputan sebuah media.

5.3. Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

Dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, masyarakat setempat telah mendapatkan manfaat khususnya manfaat dari segi ekonomi dimana di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger muncul berbagai jenis usaha baik usaha perikanan maupun non-perikanan yang bisa dijalankan.

5.3.1. Usaha Perikanan

5.3.1.1. Nelayan

Sebagian besar mata pencaharian di bidang perikanan yang ditekuni di pelabuhan perikanan adalah nelayan, termasuk di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger. Rata-rata usia nelayan di Puger berkisar antara 20 – 50 tahun, yang terdiri dari nelayan juragan dan nelayan buruh dengan tingkat pendidikan nelayan hanya sampai pada tingkat SMP. Kegiatan melaut tidak dilakukan sepanjang tahun, melainkan dilakukan pada musim ikan yaitu pada pertengahan Bulan Juli sampai dengan Bulan November atau Desember. Tetapi sebagian nelayan terkadang memaksakan diri untuk melaut di luar bulan tersebut dengan konsekuensi hasil yang didapatkan tidak maksimal atau bahkan tidak jarang pulang melaut dengan tangan kosong. Dalam kegiatan melaut, nelayan juragan biasanya juga berperan sebagai nahkoda kapal tapi sebagian juga hanya berperan sebagai pemilik modal (juragan darat). Nelayan merupakan jenis pekerjaan utama di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dan sebagian besar merupakan pekerjaan turun-temurun karena sumberdaya yang masih melimpah dari waktu ke waktu. Kapal yang digunakan oleh nelayan setempat adalah kapal sekoci, jukung, dan kapal nelayan. Untuk setiap kapal memiliki jenis alat tangkap yang berbeda. Untuk penjelasan mengenai masing-masing kapal adalah sebagai berikut:

1. Kapal Sekoci

Untuk nelayan sekoci, alat tangkap yang digunakan adalah pancing. Pada setiap tripnya, nelayan sekoci akan melaut selama 2 – 4 hari dengan jumlah nelayan sebanyak 4-5 orang. Lama tidaknya kegiatan melaut dipengaruhi oleh musim, jika sedang musim ikan mereka akan lebih lama di laut dengan tujuan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih optimal. Ketika sedang tidak musim ikan, bagi nelayan yang memiliki alat bantu penangkapan berupa rumpon, mereka melakukan pemancingan di sekitar

rumpon yang telah mereka pasang. Rata-rata dalam setahun usaha penangkapan dengan kapal sekoci melakukan 160 trip. Hasil tangkapan utama dari nelayan sekoci antara lain adalah tuna, tenggiri, cakalang, dan tongkol. Bentuk dari kapal sekoci dapat dilihat pada Gambar 3:



Gambar. 3. Kapal Sekoci

Sementara itu, secara finansial modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usaha penangkapan dengan menggunakan kapal sekoci, dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Modal dan Biaya Nelayan Sekoci

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 54.220.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 10.760.000,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 306.080.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 316.840.000,00

Dengan modal dan biaya tersebut, maka pendapatan yang diperoleh usaha penangkapan dengan menggunakan kapal sekoci setiap tahunnya bisa mencapai Rp 617.600.000,00, sehingga keuntungan yang bisa didapatkan setiap tahunnya sebesar Rp 300.760.000,00 atau sebesar Rp 1.880.000,00/trip.

2. Kapal Jukung

Usaha penangkapan yang menggunakan kapal jukung melakukan kegiatan penangkapan *one day fishing* artinya nelayan hanya melaut selama satu hari setiap tripnya. Nelayan jukung biasanya berangkat melaut pada dini hari dan kembali pada siang hari sekitar pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB. Kapal jukung dapat dilihat pada Gambar 4:



Gambar 4. Kapal Jukung

Setiap jukung terdiri dari 3 nelayan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring setet. Rata-rata nelayan jukung melakukan 120 trip setiap tahunnya. Hasil tangkapan yang biasanya didapatkan oleh nelayan jukung antara lain adalah ikan layur dan ikan lemuru. Sedangkan untuk modal dan biaya yang digunakan oleh nelayan jukung untuk menjalankan usahanya dapat dilihat pada Tabel 13:

Tabel 13. Modal dan Biaya Nelayan Jukung

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 25.220.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 7.965.000,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 47.040.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 55.005.000,00

Dengan menggunakan modal dan biaya tersebut, maka nelayan jukung bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 96.000.000,00 per tahunnya, sehingga keuntungan yang bisa diperoleh mencapai Rp 40.995.000,00/tahun atau sebesar Rp 342.000,00/trip.

3. Kapal Payang

Kegiatan usaha penangkapan yang juga ada dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah usaha penangkapan dengan menggunakan alat tangkap payang. Bentuk dari kapal payang dapat dilihat pada Gambar 5:



Gambar 5. Kapal Payang

Nelayan berangkat melaut pada malam hari dan kembali ke pelabuhan pada pagi hari dengan jumlah ABK sekitar 15 orang – 20 orang. Dalam setahun rata-rata trip yang dilakukan sebanyak 200 kali. Jenis ikan yang didapatkan antara lain seperti lemuru, tongkol, tuna, cakalang, lemuru kecil. Untuk menjalankan usaha penangkapan dengan menggunakan kapal payang, maka dibutuhkan modal dan biaya usaha. Modal dan biaya usaha penangkapan dengan kapal payang dapat dilihat pada Tabel 14:

Tabel 14. Modal dan Biaya Usaha Nelayan Payang

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 249.150.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 44.100.000,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 467.800.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 511.900.000,00

Dengan modal dan biaya seperti tersebut di atas, maka pendapatan yang diperoleh pelaku usaha penangkapan dengan menggunakan kapal payang bisa mencapai Rp 2.240.000.000,00, dengan demikian keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.728.100.000,00/tahun atau sebesar Rp 8.640.500,00/trip.

5.3.1.2. Penjual Ikan Segar

Pedagang ikan segar juga merupakan usaha yang ditekuni oleh masyarakat Puger. Di kawasan Pelabuhan Perikanan Puger, sebagian besar pedagang ikan segar didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin wanita dengan kisaran umur 25 – 50 tahun. Dalam setahun pedagang berjualan rata-rata 250 hari,. Kegiatan penjualan ikan segar dapat dilihat pada Gambar 6:



Gambar 6. Penjual Ikan Segar

Sementara itu, modal dan biaya yang dikeluarkan oleh penjual ikan segar untuk menjalankan usahanya dapat dilihat pada Tabel 15:

Tabel 15. Modal dan Biaya Penjual Ikan Segar

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 578.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 460.000,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 100.250.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 100.710.000,00

Dengan menjalankan usaha penjualan ikan segar, pelaku usaha tersebut setiap tahunnya bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 112.250.000,00/tahun sehingga keuntungan yang bisa diperoleh sebesar Rp 11.790.000,00/tahun atau per hari efektif berjualannya sebesar Rp 47.000,00.

5.3.1.3. Penjual Produk Olahan Perikanan

Selain pedagang ikan segar, juga terdapat usaha pedagang produk olahan perikanan, seperti terasi dan ikan asin. Jika dibandingkan dengan pedagang ikan segar, pedagang produk olahan tidak perlu khawatir dengan barang dagangannya dikarenakan produk yang mereka perdagangkan bukan produk yang cepat mengalami kerusakan, sehingga masih bisa diajakan kembali pada hari berikutnya. Kegiatan penjual produk olahan perikanan dapat dilihat pada Gambar 7:



Gambar 7. Penjual Produk Olahan

Besarnya modal dan biaya yang dikeluarkan oleh penjual produk olahan dapat dilihat pada Tabel 16:

Tabel 16. Modal dan Biaya Penjual Produk Olahan

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 578.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 460.000,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 100.000.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 100.460.000,00

Dengan menjalankan usaha penjualan produk olahan, maka pelaku usaha setiap tahunnya bisa memperoleh pendapatan mencapai Rp 111.750.000,00/tahun, sehingga nilai keuntungan yang bisa didapatkan sebesar Rp 11.290.000,00/tahun dengan rata-rata penjualan dilakukan 250 kali dalam setahun maka setiap melakukan aktivitasnya sebagai penjual produk olahan dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp 45.000,00.

5.3.1.4. Usaha Pengolahan

Usaha pengolahan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah pengolahan terasi dan pengolahan ikan asin. Kegiatan penjemuran ikan asin dapat dilihat pada Gambar 8:



Gambar 8. Penjemuran Ikan Asin

Ikan asin adalah salah satu jenis olahan yang banyak dijual oleh penjual produk olahan perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger. Untuk menjalankan

usaha pengolahan ikan asin, modal dan biaya yang dibutuhkan terlihat pada Tabel 17:

Tabel 17. Modal dan Biaya Usaha Pengolahan Ikan Asin

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 5.100.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 1.008.800,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 63.000.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 63.008.800,00

Dengan biaya tersebut, setiap melakukan produksi rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan adalah 50 Kg seharga Rp 28.000,00/Kg sehingga pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya bisa mencapai Rp 84.000.000,00 dan untuk keuntungan yang bisa didapatkan setiap tahunnya mencapai Rp 20.991.200,00 atau untuk setiap kali produksinya bisa mencapai Rp 350.000,00.

Untuk menjalankan usaha pengolahan terasi besarnya modal dan biaya yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada Tabel 18:

Tabel 18. Modal dan Biaya Usaha Pengolahan Terasi

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 410.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 392.800,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 20.640.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 21.032.800,00

Jumlah produksi yang dihasilkan oleh usaha pengolahan terasi setiap siklusnya sekitar 20 Kg, dengan rata-rata harga jual Rp 40.000,00/Kg maka pendapatan yang bisa diperoleh selama setahun oleh pelaku usaha tersebut sebesar Rp 48.000.000,00 sedangkan keuntungan yang diperoleh dalam setahun bisa mencapai Rp 26.967.200,00 atau sebesar Rp 449.000,00/siklus produksinya.

5.3.1.5. Usaha Pengepakan

Usaha pengepakan merupakan usaha yang bergerak di bidang pendistribusian hasil tangkapan ikan nelayan Puger ke kota-kota lainnya seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Bali. Persiapan pendistribusian produk perikanan melalui usaha pengepakan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dapat dilihat pada Gambar 9:



Gambar 9. Persiapan Pendistribusian Produk Perikanan

Usaha pengepakan dijalankan dengan menggunakan modal dan biaya yang jumlahnya bisa dilihat pada Tabel 19:

Tabel 19. Modal dan Biaya Usaha Pengepakan

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 131.913.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 142.154.500,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 4.582.380.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 4.724.534.500,00

Dengan melakukan pengiriman ikan jenis tuna, tongkol, dan lemuru maka penerimaan yang diperoleh selama setahun sebesar Rp 5.088.000.000,00, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 363.465.500,00 per tahun atau Rp 30.289.000,00/bulan.

5.3.1.6. Jasa Angkut Hasil Tangkapan (Manol)

Manol merupakan jenis jasa yang ditawarkan beberapa masyarakat untuk mengangkut hasil tangkapan dari kapal menuju darat. Biasanya yang menjadi manol adalah nelayan kecil/ABK yang tidak pergi melaut. Dalam melakukan pekerjaan, seorang manol bekerja sama dengan seorang manol yang lain untuk mengangkut ikan yang sudah ada di keranjang. Aktivitas manol dapat dilihat pada Gambar 10:



Gambar 10. Jasa Manol

Upah yang diterima oleh manol setiap harinya berkisar antara Rp 20.000,00 – Rp 100.000 tergantung berapa kali Manol melakukan pengangkutan hasil tangkapan. Seperti halnya nelayan, pendapatan manol akan semakin meningkat jika sedang musim ikan, karena jumlah ikan yang diangkut akan semakin banyak, tetapi ketika sedang tidak musim ikan, pendapatan yang mereka peroleh menurun drastis bahkan bisa tidak mendapatkan apa-apa.

5.3.2. Usaha Non-Perikanan

5.3.2.1. Penjual Es Degan

Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger memiliki cuaca yang cukup panas, sehingga tidak jarang ditemui orang yang merasa haus dan membutuhkan minuman-minuman yang menyegarkan. Melihat kondisi seperti ini, maka muncul

peluang usaha baru di luar bidang perikanan di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger yaitu penjual minuman segar, khususnya es degan. Dalam setahun penjual es degan di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger melakukan aktivitasnya \pm 280 hari. Untuk memulai usaha ini, modal dan biaya yang dibutuhkan seperti pada Tabel 20:

Tabel 20. Modal dan Biaya Penjual Es Degan

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 1.620.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 334.285,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 21.000.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 21.334.285,00

Rata-rata volume penjualan kurang lebih 30 gelas, sehingga dalam setahun dengan berjualan 280 hari, penerimaan yang didapatkan sebesar Rp 29.400.000,00. Dengan demikian keuntungan yang bisa didapatkan oleh penjual es degan sebesar Rp 8.065.715,00/tahun atau Rp 29.000,00/harinya.

5.3.2.2. Penjaga Toilet Umum

Sebagai tempat umum, tentunya fasilitas toilet umum sangat dibutuhkan oleh pengunjung. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sendiri terdapat 2 toilet umum. Kedua toilet umum ini dikelola oleh warga setempat, yakni warga Puger Kulon dan Puger Wetan. Dengan tarif sebesar Rp 2.000,00 pendapatan yang didapatkan berkisar antara Rp 50.000,00-Rp 70.000,00 per harinya. Untuk saat ini, belum ada retribusi yang dibayarkan oleh penjaga toilet umum kepada pihak UPPPP Puger dengan alasan biaya listrik dan biaya air masih ditanggung oleh mereka sendiri walaupun fasilitas toilet umum adalah milik UPPPP Puger.

5.3.2.3. Jasa Transportasi Pulau Kucur

Lokasi pelabuhan yang berdekatan dengan Cagar Alam Watangan atau lebih dikenal masyarakat setempat dengan nama Pulau Kucur yang notabene merupakan salah satu tujuan wisata masyarakat tentunya membuka peluang usaha baru yaitu jasa yang melayani antar jemput pengunjung, karena lokasinya dengan pelabuhan dibatasi oleh perairan. Jenis kapal yang digunakan adalah jenis jukung. Pengemudi jukung biasanya merupakan nelayan yang sudah tidak melaut lagi, kapal yang digunakan adalah kapal milik juragan sehingga setiap hasil yang didapat tidak sepenuhnya dimiliki oleh pengemudi. Sistem bagi hasil yang dilakukan pun tidak menentu tergantung ketentuan yang dibuat oleh juragan. Kisaran pendapatan yang diterima oleh mereka sebesar Rp 20.000,00 – Rp 100.000,00. Pendapatan yang lebih tinggi biasanya diperoleh di akhir pekan dimana lebih banyak pengunjung melepas penat bersama keluarga di Pulau Kucur.

5.3.2.4. Penjual Bakso

Jenis usaha yang hampir selalu ada di setiap tempat, termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai Puger adalah penjual bakso. Penjual bakso di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, menjajakan bakso dengan menggunakan gerobak dorong. Penjual bakso memulai aktivitasnya pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB dan biasanya baru pulang setelah dagangan yang dibawa habis atau sampai sore hari. Jika di dalam pelabuhan tidak habis, maka akan dijajakan di luar pelabuhan. Modal dan biaya yang dibutuhkan oleh penjual bakso untuk memulai usahanya dapat dilihat pada Tabel 21:

Tabel 21. Modal dan Biaya Penjual Bakso

No.	Komponen Usaha	Nilai (Rp)
1.	Modal Investasi	Rp 2.300.000,00
2.	Biaya Tetap/tahun	Rp 270.000,00
3.	Biaya Variabel/tahun	Rp 26.880.000,00
4.	Biaya Total/tahun	Rp 27.150.000,00

Rata-rata volume penjualan per hari adalah 28 porsi dengan harga Rp 5.000,00/porsi dan jumlah hari berjualan mencapai 280 hari maka penerimaan yang didapatkan per tahun sebesar Rp 39.200.000,00 dan untuk keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 12.050.000,00/tahun atau Rp 43.000,00/harinya.

5.4. Kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger Terhadap PAD

Pelabuhan Perikanan Puger merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada langsung di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga pemasukan yang didapatkan akan masuk ke PAD Jawa Timur sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Sedangkan yang termasuk sumber PAD Kabupaten Jember adalah retribusi TPI dan perizinan usaha penangkapan yang menggunakan kapal dibawah 30 GT.

5.4.1. Kontribusi Terhadap PAD Kabupaten Jember

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2013 mencapai Rp 303,845 miliar, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 4,73%. Sebelumnya pada Tahun 2012, PAD Kabupaten Jember sebesar Rp 290,135 miliar.

Kontribusi sektor perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Jember meliputi retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi izin

usaha perikanan tangkap. Tetapi karena pelelangan yang tidak berjalan, maka pada tahun 2013 tidak ada retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan. Selain itu, untuk saat ini sektor perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger belum bisa berkontribusi secara optimal terhadap PAD Jember, padahal potensi untuk peningkatan PAD dari sektor tersebut sangat melimpah. Untuk tingkat Kabupaten Jember izin usaha perikanan tangkap hanya diberlakukan kepada pelaku usaha penangkapan yang menggunakan kapal penangkapan dengan kekuatan kurang dari 10 GT, untuk kapal penangkapan yang berkekuatan 10 GT – 30 GT mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan mengenai retribusi izin usaha perikanan tangkap di Kabupaten Jember telah diatur dalam Perda Jember No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Usaha Tertentu, Perda ini diciptakan untuk mengatur perizinan alat tangkap yang digunakan oleh pelaku usaha penangkapan di Kabupaten Jember, termasuk nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger.

Besaran pajak yang ditetapkan untuk setiap alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan berbeda-beda, adapun perincian pajak jika disesuaikan dengan Perda Jember No. 6 Tahun 2011 yang harus dibayarkan untuk setiap alat tangkap dapat dilihat pada Tabel 22:

Tabel 22. Perda Jember 6/2011 untuk perikanan tangkap

No.	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penangkapan ikan dengan kapal/perahu motor diatas 5 GT – 10 GT dan dengan alat tangkap:		
	➢ Payang	100.000,00	Per tahun/unit
	➢ Jaring/Gill Net	50.000,00	Per tahun/unit
	➢ Pancing/Long Line	100.000,00	Per tahun/unit

(Sumber : Perda Jember No. 6 Tahun 2011)

Pada tahun 2013 pemasukan yang didapatkan dari retribusi izin usaha perikanan tangkap sebesar Rp 3.300.000,00 dari target awal sebesar Rp 10.000.000,00 atau hanya terealisasi sebesar 33%. Pemasukan dari retribusi izin usaha perikanan tangkap termasuk di dalam PAD Kabupaten Jember dari sektor retribusi daerah. Pada tahun 2013 retribusi daerah berkontribusi sebesar Rp 44.192.346.021,00. Sehingga untuk besarnya kontribusi retribusi izin usaha perikanan tangkap terhadap retribusi daerah secara keseluruhan adalah:

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Retribusi Izin Usaha Perikanan (Rp)}}{\text{Retribusi Daerah (Rp)}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Rp 3.300.000,00}}{\text{Rp 44.192.346.021,00}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Ret. Izin Usaha Perikanan (\%)} = 0,07 \%$$

Sedangkan besarnya kontribusi perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Kabupaten Jember adalah:

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Retribusi Izin Usaha Perikanan (Rp)}}{\text{PAD Jember (Rp)}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Rp 3.300.000,00}}{\text{Rp 303.845.078.814,00}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Ret. Izin Usaha Perikanan (\%)} = 0,001\%$$

Sektor perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger hanya berkontribusi sebesar 0,001% terhadap PAD Kabupaten Jember. Jika dilihat dari jumlah kapal berkekuatan antara 5-10 GT dan jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger kemudian disesuaikan dengan Perda Jember No. 6 Tahun 2011 seperti tersebut di atas dan Perda Jember No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dimana di dalamnya dijelaskan mengenai

struktur dan besaran tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 2,5% dari harga transaksi penjualan hasil lelang, maka kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sebesar 0,001% merupakan nilai yang sangat kecil dan masih berpotensi untuk ditingkatkan untuk ke depannya.

Tidak optimalnya kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Ketergantungan sebagian masyarakat nelayan terhadap pengambek dalam urusan permodalan mengakibatkan proses pelelangan yang seharusnya terjadi di TPI tidak bisa dilaksanakan. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Suwandi sebagai Ketua TPI Puger:

“Nelayan disini itu tergantung kepada pengambek (pemilik modal), keuntungannya bagi mereka dalam melakukan peminjaman modal kepada pengambek tidak membutuhkan jaminan/agunan yang menyulitkan nelayan, tidak seperti di perbankan/koperasi. Tetapi kerugiannya, nelayan hanya bisa menjual hasil tangkapannya kepada pengambek tanpa proses lelang, misalnya harga ikan di pasar Rp 15.000,00 oleh pengambek hanya dihargai Rp 13.000,00.”

- b. Rendahnya tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam urusan pembayaran pajak dibuktikan dengan ketidaklengkapan surat-surat berharga baik itu kapal maupun kendaraan pribadi seperti yang dinyatakan oleh Bapak Arief selaku Kepala UPPPP Puger:

“Masyarakat sini itu tingkat kesadaran untuk membayar pajak sangat kurang, bukan hanya di usaha perikanan yang dijalankan bahkan bangunan dan kendaraan mereka itu banyak yang bodong (tanpa surat), ini juga yang

menyusahkan mereka dalam proses peminjaman modal dari Perbankan/Koperasi.”

- c. Terdapat lokasi pendaratan ikan yang lain di Kabupaten Jember, selain di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger, seperti di Ambulu, Kencong, Gumukmas, dan di Tempurejo.

Sedangkan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jember, UPPPP Puger, dan TPI Puger untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Jember adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara bertahap kepada nelayan mengenai manfaat memiliki kelengkapan surat-surat yang berhubungan dengan usaha yang dijalankan dan kerugian jika tidak memilikinya.
2. UPPPP Puger berkoordinasi dengan TPI Puger dan beberapa masyarakat nelayan yang usahanya tidak tergantung kepada pengambang untuk melakukan diskusi dengan harapan aktivitas pelelangan ikan bisa kembali dirintis dan sedikit demi sedikit akan mempengaruhi nelayan lain agar selamanya tidak tergantung pada pengambang.
3. UPPPP Puger dan TPI Puger bermitra dengan pengambang untuk membentuk lembaga keuangan yang sifatnya memberikan pinjaman kepada nelayan, dengan perjanjian dari hasil penjualan/pelelangan ikan diambil sekian persen yang masuk ke pengambang dan ke TPI Puger sebagai sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.
4. Pemerintah melalui Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, UPPPP Puger, dan TPI Puger memberikan bantuan modal yang bersifat pinjaman kepada nelayan dan membentuk/memperkuat lembaga keuangan yang ada

di masyarakat, sehingga bantuan modal yang sudah diberikan bisa terus berputar.

5.4.2. Kontribusi Terhadap PAD Provinsi Jawa Timur

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Puger merupakan UPT yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga untuk pemasukan yang didapatkan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Pada Tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar Rp.9.052.349.747.639,00. Sementara itu rata-rata pemasukan per tahun yang didapatkan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sebesar Rp 53.961.000,00 berdasarkan pada penghitungan pemasukan per bulan (Bulan Januari 2014). Untuk perinciannya disajikan dalam Tabel 23:

Tabel 23. Pemasukan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

No.	Uraian Pemasukan	Nilai (Rp)
1.	Pas Masuk Pelabuhan	Rp 5.592.000,00
2.	Es Masuk Wilayah Pelabuhan	Rp 264.000,00
3.	Pembuatan/Perbaikan Kapal	Rp 24.480.000,00
4.	Pemakaian Peralatan	Rp 2.880.000,00
5.	Jasa Kebersihan	Rp 12.000.000,00
6.	Sewa Gedung	Rp 8.745.000,00
JUMLAH		Rp 53.961.000,00

Sehingga dapat diketahui kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Provinsi Jawa Timur adalah:

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Pemasukan UPPPP Puger (Rp)}}{\text{PAD Jawa Timur (Rp)}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Rp 53.961.000,00}}{\text{Rp 9.052.349.747.639,00}} \times 100 \%$$

$$\text{Kontribusi Ret. Izin Usaha Perikanan (\%)} = 0,00059 \%$$

Nilai kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Jawa Timur sebesar 0,00059%, pemasukan kecil ini juga diakui oleh Kepala UPPPP Puger yang mengatakan bahwa pemasukan yang didapatkan oleh UPPPP Puger belum bisa optimal. Sebenarnya retribusi pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sudah diatur oleh Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Jatim Nomor 15 Tahun 2013, tetapi karena pelaksanaannya yang belum optimal maka pemasukan yang didapatkan juga belum bisa berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur. Pemasukan yang didapatkan oleh Pelabuhan Perikanan Pantai Puger melalui retribusi pelayanan jasa kepelabuhan dimasukkan seluruhnya ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dari sektor Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecilnya kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur, yakni:

1. Beberapa jenis usaha tidak dikenakan pajak/sewa atas fasilitas yang digunakan seperti usaha transportasi Pulau Kucur, penjual ikan segar/olahan dengan bangunan semi permanen tidak dikenakan sewa atas tanah yang digunakan dengan alasan untuk menghindari protes berlebihan dari pelaku usaha jika sewaktu-waktu dilakukan penggusuran terhadap lapak yang mereka dirikan. Selain itu, untuk penggunaan fasilitas MCK, masyarakat sebagai pengelola tidak dikenakan sewa gedung dengan alasan mereka sudah menanggung biaya listrik dan biaya air yang digunakan.
2. Pemasukan pas masuk yang belum dijalankan dengan baik, beberapa kendaraan masuk dan keluar dengan bebas.
3. Pemasukan dari jasa kebersihan belum dioptimalkan, terutama jasa kebersihan kolam labuh.

4. Jika dilihat dari fungsi dan kelas Pelabuhan Perikanan Puger sebagai pelabuhan yang berstatus PPP, maka bisa dikatakan pemanfaatannya belum optimal.
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang rendah menjadi faktor utama, karena dengan peraturan yang sebaik apapun tetapi tidak ada dukungan dari masyarakat peraturan yang ada akan menjadi sia-sia.

Menurut Kepala UPPPP Puger, untuk ke depannya diperlukan perbaikan yang masiv baik terhadap peraturan, sumberdaya alam, sumberdaya buatan maupun sumberdaya manusia yang ada di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger agar aktivitas-aktivitas di dalamnya berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akan terjadi peningkatan pendapatan bagi setiap pelaku usaha dan juga peningkatan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur serta yang lebih penting lagi sumberdaya alam yang ada masih bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lebih panjang.

5.5. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

Berdasarkan hasil penelitian di lapang maka dapat diketahui bahwa adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitarnya. Tentunya untuk mendapatkan manfaat dari adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dibutuhkan pengelolaan terhadap sumberdaya yang ada di dalamnya baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan. Pengelolaan di Pelabuhan Perikanan Pantai Puger meliputi pengelolaan terhadap sumberdaya perikanan, pengelolaan terhadap lingkungan pelabuhan, pengelolaan terhadap sumberdaya manusia, pengelolaan terhadap aktivitas masyarakat, dan

pengelolaan sumberdaya alam secara religius. Dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaannya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Manfaat yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas adalah dengan adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger maka dapat memunculkan peluang usaha baik di bidang perikanan maupun non perikanan. Peluang usaha di bidang perikanan seperti usaha penangkapan, usaha penjualan produk perikanan, usaha pengolahan perikanan, usaha pengepakan, dan usaha lainnya. Peluang usaha di bidang non perikanan seperti jasa transportasi Pulau Kucur, Usaha makanan, dan jasa-jasa lainnya. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat secara umum masih kurang dari cukup hal ini dikarenakan pengelolaan pelabuhan yang belum optimal, beberapa fasilitas tidak digunakan sesuai dengan fungsi aslinya dan peraturan-peraturan yang belum dipatuhi secara keseluruhan oleh masyarakat sendiri.

Selain merugikan bagi masyarakat, karena Pelabuhan Perikanan Pantai Puger merupakan asset yang berpotensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka pengelolaannya yang belum optimal juga mengakibatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember maupun Provinsi Jawa Timur tidak bisa maksimal. Sehingga untuk mengatasinya, *stake holder* yang terkait dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger dan juga masyarakat harus berkoordinasi untuk memperbaiki sektor-sektor yang menjadi kelemahan pelabuhan dalam kontribusinya terhadap PAD. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya antara lain dengan cara melakukan sosialisasi bertahap mengenai perpajakan kepada masyarakat dengan harapan kesadaran masyarakat akan pajak semakin meningkat, merintis kembali proses pelelangan di TPI Puger, mengoptimalkan sumber-sumber pemasukan pelabuhan yang selama ini belum dijalankan dengan baik, dan yang terpenting adalah peningkatan kemampuan

sumberdaya manusia baik yang berasal dari UPPPP Puger maupun masyarakat pelabuhan.

Salah satu strategi yang dapat ditempuh dalam upaya membangun masyarakat pesisir agar potensi pembangunan dapat dikelola dengan baik adalah dengan membangun dan memperkuat kelembagaan sosial yang dimiliki atau yang ada pada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dengan jalan memperluas wawasan pembangunan dan ketrampilan ekonomi masyarakat. Diharapkan melalui strategi ini masyarakat secara kolektif mempunyai kemampuan optimal dalam membangun wilayahnya (Hendratmoko dan Marsoedi, 2010).

Kesadaran masyarakat Pelabuhan Perikanan Pantai Puger untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan PAD sangat dibutuhkan, karena tujuan dari adanya PAD sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara dilakukannya pembangunan maupun perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Puger melalui pemerintah dengan menggunakan dana yang berasal dari PAD. Jadi bisa dikatakan bahwa percepatan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yaitu dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada tujuan penelitian sebagaimana diungkapkan pada Bab Pendahuluan serta hasil dari proses olah data, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai Puger merupakan pelabuhan perikanan yang terletak di Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan dikelola oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger. UPPPP Puger merupakan UPT yang berada langsung di bawah naungan Provinsi Jawa Timur.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Puger meliputi pengelolaan sumberdaya perikanan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan kegiatan manusia, dan pengelolaan secara religius (petik laut).
3. Adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Puger memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat setempat berupa peluang usaha yang bisa mereka jalankan baik usaha di bidang perikanan seperti penangkapan dan penjualan produk perikanan maupun usaha di luar bidang perikanan seperti usaha makanan/minuman dan jasa transportasi Pulau Kucur.
4. Kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Kabupaten Jember maupun Provinsi Jawa Timur masih belum bisa maksimal, hal ini dikarenakan tidak optimalnya beberapa fungsi pelabuhan, masih banyak usaha yang dijalankan secara illegal, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pajak.

6.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah didapatkan, maka saran yang bisa diberikan adalah:

1. Bagi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger, merumuskan dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap PAD Kabupaten Jember dan PAD Provinsi Jawa Timur, untuk melakukannya bisa dimulai dengan mengembalikan fungsi TPI Puger sebagaimana mestinya, hal ini bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengembangan kualitas masyarakat nelayan; melakukan kerjasama dengan pengambang sebagai pemberi modal pinjaman nelayan; dan memberikan bantuan modal pinjaman serta membentuk/memperkuat lembaga keuangan yang mengatur bantuan modal pinjaman tersebut sehingga bantuan tersebut bisa terus berputar dan nelayan tidak bergantung pada pengambang dan peraturannya yang merugikan nelayan.
2. Bagi masyarakat, diharuskan memiliki kesadaran dalam menjalankan usahanya baik kesadaran terhadap kelestarian sumberdaya alam, kesadaran tentang rasa peduli sesama manusia dan juga kesadaran administratif usaha mereka yang berpengaruh terhadap perkembangan usahanya di masa yang akan datang.
3. Bagi Peneliti, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai usaha-usaha di dalam Pelabuhan Perikanan Pantai Puger maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember, sehingga dengan semakin banyaknya penelitian mengenai permasalahan dalamnya akan bisa

dicetuskan kebijakan yang tepat untuk mengemangkan pelabuhan ke arah yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2013. **Pembangunan Ekonomi Maritim**. Graha Ilmu. Yogyakarta. 164 hlm.
- Arikunto, S. 2009. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asianbrain, 2012. **Perencanaan Sumber Daya Manusia**. <http://www.anneahira.com/artikel-umum/sumber-daya-manusia.htm>. Diakses pada 18 Juni 2014 pukul 14.00 WIB.
- Buku Panduan Keuangan Daerah. 2007. **Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang PU/Cipta Karya**. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta Selatan. 29 hlm.
- Chalid, P. 2005. **Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan**. Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan Yang Baik. Jakarta.
- David, 2014. **Pendapatan Masyarakat Perikanan**. <http://davitwae.blogspot.com/2014/04/makalah-ekonomi-perikanan-pendapatan-masyarakat-pesisir.html>. Diakses pada Minggu, 13 Juli 2014 pukul 16.00 WIB.
- Dias, 2013. **Pendapatan Asli Daerah Sebagai Cerminan Ekonomi Daerah**. <http://dhasitsme.wordpress.com/2013/06/30/pendapatan-asli-daerah-sebagai-cerminan-ekonomi-daerah/> diakses tanggal 29 Maret 2014
- Dzulfikar, R. **Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur (Skripsi)**. FPIK UB Malang.
- Effendi, I dan W. Oktariza, 2006. **Manajemen Agribisnis Perikanan**. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Ginting, R.F. **Kondisi Dan Potensi Pengembangan Kepelabuhan Perikanan Di Kabupaten Subang (Skripsi)**. IPB Bogor.
- Hendratmoko, C. dan H. Marsoedi. 2010. **Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap Di Kabupaten Cilacap**. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol. 6 No. 1 Hal. 1 – 17.
- Khabib, Khoirul. 2014. **Strategi Pengembangan Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo (*Clarias Gariepinus*) Di Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung Jawa Timur (Skripsi)**. FPIK UB. Malang.

- Kurniawati, A.D. 2011. **Perbandingan Kelayakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Probolinggo Dengan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Pacitan (Skripsi)**. FPIK UB. Malang.
- Kusnadi. 2006. **Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**. Humaniora. Bandung. 104 hlm.
- Lubis, A. 2009. **Upaya Meningkatkan Partispasi Dalam Pembangunan**. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED. Volume 6. No. 2.
- Lubis, E. dan N Murdiana. 2011. **Peranan Fasilitas PPI Terhadap Kelancaran Aktivitas Pendaratan Ikan Di Cituis Tangerang**. Jurnal Teknologi Perikanan da Kelautan. Volume 1. Nomor 2. Mei 2011 : 1-10.
- Mardalis. 1999. **Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)**. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardikanto, T. dan P. Soebianto. 2013. **Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik**. Alfabeta. Bandung. 342 hlm.
- Marlon, S. *et al.* 2005. **Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Wilayah Pesisir**. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah WAHANA HIJAU. Volume 1. No. 2.
- Muawanah, A. 2013. **Pelabuhan Perikanan Beserta Fungsi dan Pengelolaannya**. <http://annisamuawanah.wordpress.com/2013/05/06/pelabuhan-perikanan/> diakses pada tanggal 29 Maret 2014.
- Muhammad, S. 2012. **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir : Model Kemitraan Socio-Ecocentrisme**. UB Press. Malang. 304 hlm.
- Muma'izah, 2013. **Pemetaan Potensi Sumberdaya Pesisir Desa Kemantren Kec. Paciran Kab. Lamongan, Jawa Timur (Skripsi)**. FPIK UB. Malang.
- Nikijuluw, V. 2002. **Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**. P3R Dan Cidesindo. Jakarta.
- Nur, *et al.* 2013. **Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba)**
- Peraturan Menteri dan Kelautan Nomor 16 Tahun 2006 Tentang **Pelabuhan Perikanan**
- Primyastanto, M. dan N. Istikhoroh. 2003. **Aplikasi Evaluasi Proyek Dalam Aspek Studi Kelayakan (Usaha Pembesaran Ikan Gurame)**. FPIK UB. Malang.

- Purwanti, P. 2010. **Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil Dalam Mencapai Ketahanan Pangan.** UB Press. Malang. 198 hlm.
- Prasetyo, A.E. 2014. **Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu Di Desa Labuhan Kec. Brondon Kab. Lamongan Jawa Timur (Skripsi).** FPIK UB. Malang.
- Ratunnisa. 2011. **Dampak Kebijakan Retribusi Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah.** <http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/32475?mode=full>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2014.
- Rinaldi, A.Y. 2014. **Persepsi Nelayan Alat Tangkap Mini Trawl Terhadap Penangkapan Ikan Yang Berkelanjutan Di Kec. Lekok Kab. Pasuruan, Jawa Timur (Skripsi).** FPIK UB. Malang.
- Riyanto, B. 1995. **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan.** Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta.
- Sabar, R. 2007. **Pengantar Metodologi Penelitian.** FKIP. Universitas Muria Kudus. Jawa Tengah.
- Sanapiah, F. 1990. **Format-Format Penelitian Sosial.** Grafindo. Jakarta.
- Soesalit, A. 2013. **Kondisi Pelabuhan Perikanan di Indonesia.** <http://penyuluhkp.blogspot.com/2013/10/penyuluhan-perikanan-indonesia.html>. diakses pada tanggal 29 Maret 2014
- Triatmodjo, B. 2009. **Perencanaan Pelabuhan.** Beta Offset. Bandung. 490 hlm.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintahan Daerah.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang **Perikanan.**
- Wardiyanta. 2006. **Metode Penelitian Pariwisata.** CV Andi Offset. Yogyakarta. 103 hlm.
- Zen, L.W. 2009. **Analisis Kontribusi Pendapatan Wanita Nelayan Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.** Jurnal Mangrove dan Pesisir IX (1) : 12-17
- Zulganef. 2008. **Metode Penelitian Sosial dan Bisnis.** Graha Ilmu. Yogyakarta. 332 hlm.

LAMPIRAN

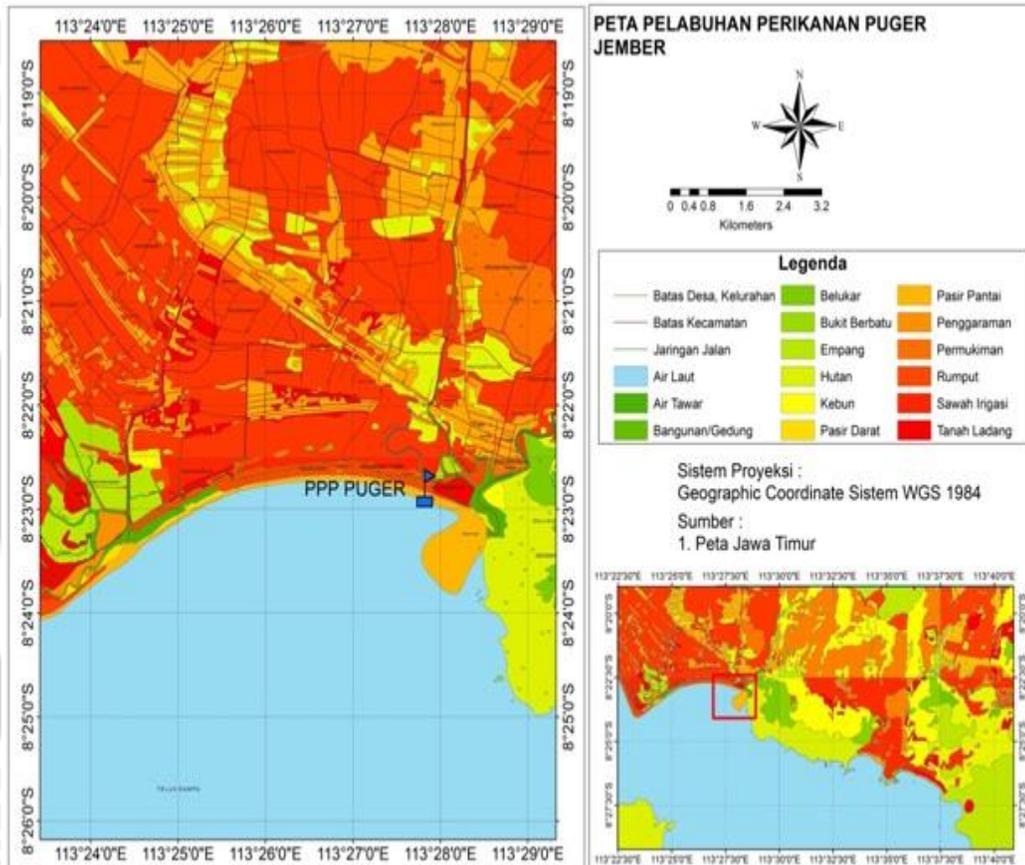
Lampiran 1. Peta Provinsi Jawa Timur

Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Letak dari Kabupaten Jember pada Peta Provinsi Jawa Timur ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah pada gambar di bawah ini:

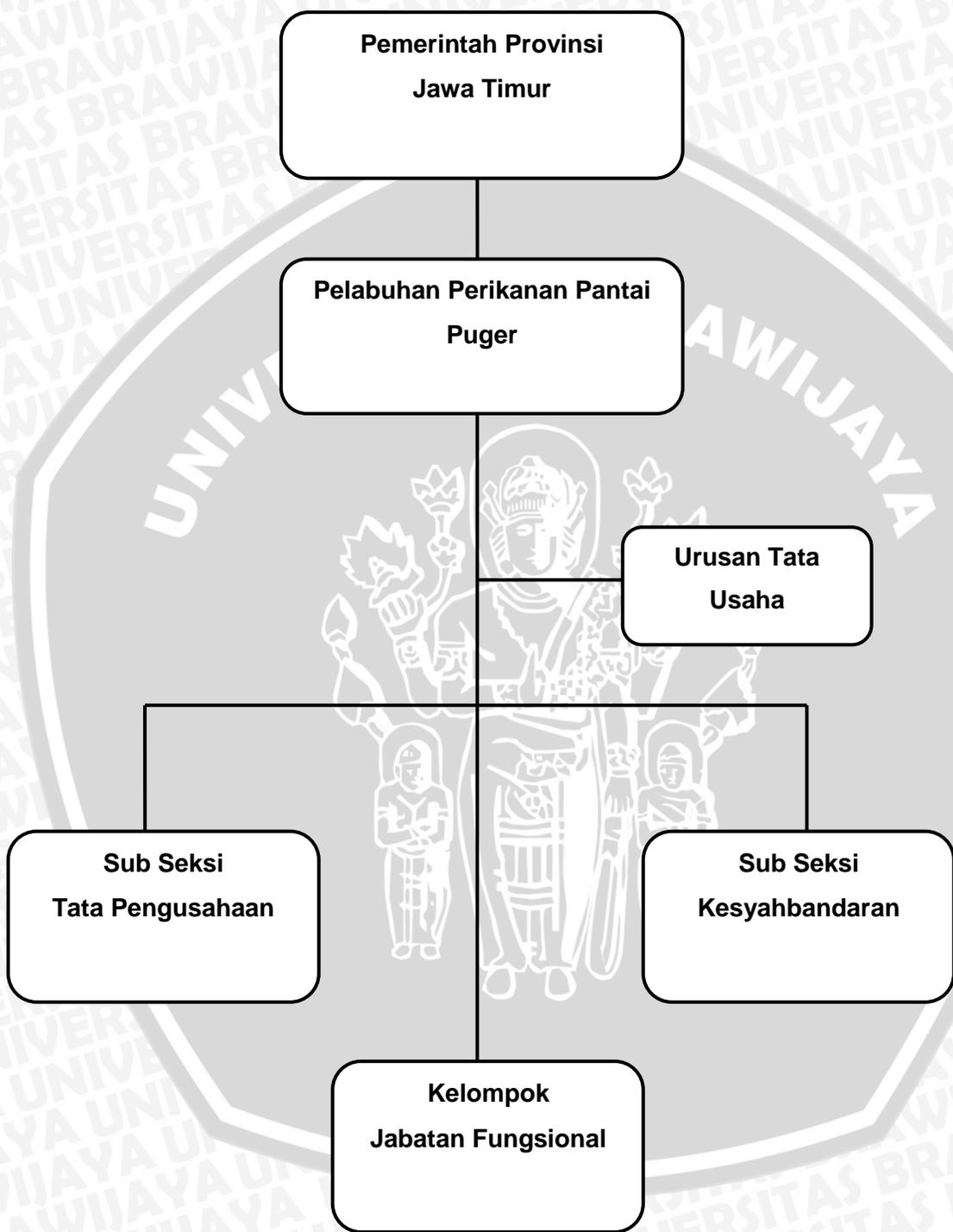


Lampiran 2. Peta Pelabuhan Perikanan Pantai Puger

Pelabuhan Perikanan Pantai Puger terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Lokasinya dapat dilihat pada Peta Pelabuhan Perikanan Pantai Puger berikut ini:



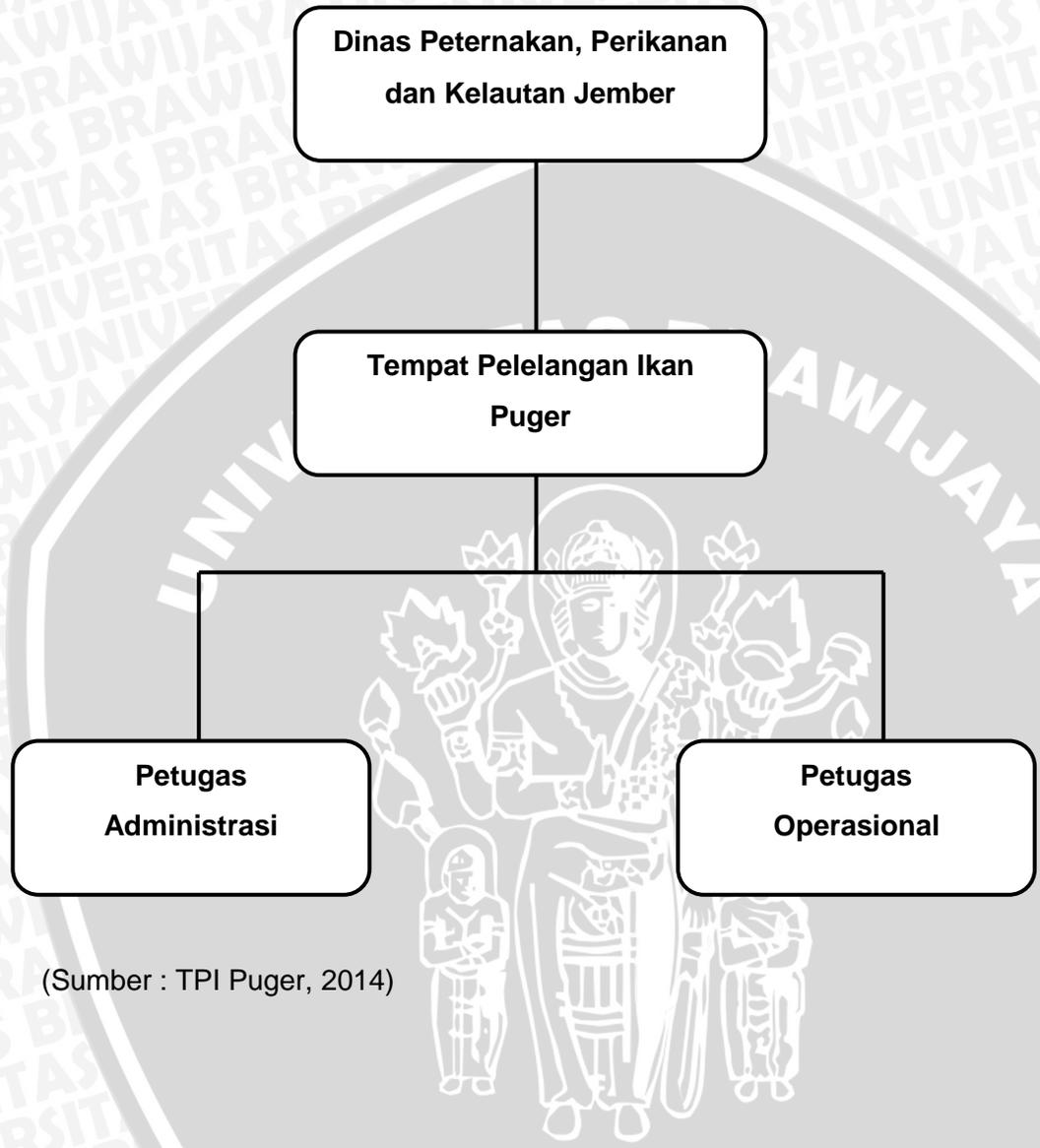
Lampiran 3. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai Puger



(Sumber : UPPPP Puger, 2014)



Lampiran 4. Struktur Organisasi TPI Puger



(Sumber : TPI Puger, 2014)



Lampiran 5. Perhitungan Finansial

1. Usaha Penangkapan (Kapal Sekoci)

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Kapal (Sekoci)	1 unit	40.000.000	40.000.000	10	4.000.000
2.	Pancing	5 unit	600.000	3.000.000	5	600.000
3.	Mesin	2 unit	5.500.000	11.000.000	10	1.100.000
4.	Tali Tambang	1 unit	150.000	150.000	5	30.000
5.	Timba	2 unit	10.000	20.000	2	10.000
6.	Keranjang	5 unit	10.000	50.000	2	25.000
Total				54.220.000		5.760.000

b. Biaya Tetap Per Tahun (FC)

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	5.760.000
2.	Perawatan Kapal	3.000.000
3.	Perawatan alat tangkap	2.000.000
Total		10.760.000

c. Biaya Variabel Per Tahun (VC)

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Nilai (Rp x 160)
1.	Solar	150 liter	5.500	132.000.000
2.	Es	40 balok	6.000	38.400.000
3.	Oli	2 liter	30.000	9.600.000
4.	Air Tawar	6 jerigen	3.000	2.880.000
5.	Konsumsi	-	550.000	80.000.000
6.	Umpan	-	50.000	4.800.000
7.	ABK	4 @800.000/bulan		38.400.000
Total				306.080.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 10.760.000,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 306.080.000,00

- Biaya Total (TC) = 10.760.000 + 306.080.000
= Rp 316.840.000,00
- Penerimaan :
 - a. Tuna = 15.000 x 60 Kg x 160 = Rp 144.000.000,00
 - b. Tenggiri = 30.000 x 40 Kg x 160 = Rp 192.000.000,00
 - c. Cakalang = 17.000 x 50 Kg x 160 = Rp 136.000.000,00
 - d. Tongkol = 13.000 x 70 Kg x 160 = Rp 145.600.000,00
 - e. Total (TR) = Rp 617.600.000,00
- Keuntungan :
 - a. Per Tahun = 617.600.000 – 316.840.000
= Rp 300.760.000,00
 - b. Per Trip = Rp 1.880.000,00

2. Usaha Penangkapan (Kapal Jukung)

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Kapal (Jukung)	1 unit	20.000.000	20.000.000	10	2.000.000
2.	Jaring	1 unit	4.000.000	4.000.000	5	800.000
3.	Mesin	2 unit	5.500.000	11.000.000	10	1.100.000
4.	Tali Tambang	1 unit	150.000	150.000	5	30.000
5.	Timba	2 unit	10.000	20.000	2	10.000
6.	Keranjang	5 unit	10.000	50.000	2	25.000
Total				25.220.000		3.965.000

b. Biaya Tetap

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	3.965.000
2.	Perawatan Kapal	2.000.000
3.	Perawatan alat tangkap	2.000.000
Total		7.965.000

c. Biaya Variabel

No.	Komponen Biaya Variabel	Harga/Unit (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp x 120)
1.	Gaji ABK	600.000/Bulan	2	14.400.000
2.	Solar	5.500	40 liter	26.400.000
3.	Oli	40.000	0,5 liter	2.400.000
4.	Es balok	8.000	4	3.840.000
Total				47.040.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 7.965.000,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 47.040.000,00

➤ Biaya Total (TC) = 7.965.000 + 47.040.000
= Rp 55.005.000,00

➤ Hasil Produksi per tahun (120x trip) :

a. Ikan Lemuru = 40 Kg x 8.000 x 120 = Rp 38.400.000,00

b. Ikan Layur = 60 Kg x 8.000 x 120 = Rp 57.600.000,00

c. Penerimaan (TR) = Rp 96.000.000,00 /tahun

➤ Keuntungan :

a. Per Tahun = 96.000.000 – 55.005.000
= Rp 40.995.000,00

b. Per Trip = Rp 342.000/trip

3. Usaha Penangkapan (Kapal Payang)

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Kapal	1 Unit	150.000.000	150.000.000	10	15.000.000
2.	Payang	1 Unit	60.000.000	60.000.000	10	6.000.000
3.	Keranjang	50 Unit	40.000	2.000.000	2	1.000.000
4.	Mesin	1 Unit	27.000.000	27.000.000	10	2.700.000

5.	Cool Box	2 Unit	2.500.000	5.000.000	5	1.000.000
6.	Lampu	10 Unit	10.000	100.000	1	100.000
7.	Lampu Tanda Bahaya	1 unit	50.0000	50.000	1	50.000
8.	Tali Tambang	2 Unit	2.500.000	5.000.0000	4	1.250.000
Total				249.150.000		27.100.000

b. Biaya Tetap (FC)

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	27.100.000
2.	Perawatan Kapal	10.000.000
3.	Perawatan alat tangkap	7.000.000
Total		44.100.000

c. Biaya Variabel Per Tahun (VC)

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Nilai (Rp x 200)
1.	Solar	100 liter	5.500	110.000.000
2.	Es	30 balok	6.000	36.000.000
3.	Oli	10 liter	250.000	50.000.000
4.	Air Tawar	3 jerigen	3.000	1.800.000
5.	ABK	15 @1500.000/bulan		270.000.000
Total				467.800.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 44.100.000,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 467.800.000,00

➤ Biaya Total (TC) = 44.100.000 + 467.800.000
= Rp 511.900.000,00

➤ Penerimaan :

a. Lemuru = 8.000 x 100 Kg x 200 = Rp 160.000.000,00

b. Tongkol = 12.000 x 300 Kg x 200 = Rp 720.000.000,00

- c. Selingsing = $15.000 \times 400 \text{ Kg} \times 200 = \text{Rp } 1.200.000.000,00$
- d. Lemuru Kecil = $4.000 \times 200 \text{ Kg} \times 200 = \text{Rp } 160.000.000,00$
- e. Total = $\text{Rp } 2.240.000.000,00$

➤ Keuntungan :

- a. Per Tahun = $2.240.000.000 - 511.900.000$
= $\text{Rp } 1.728.100.000,00$
- b. Per Trip = $\text{Rp } 8.640.500,00$

4. Usaha Pengemasan

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Cool Box (Besar)	8	2.500.000	20.000.000	5	4.000.000
2.	Cool Box (Kecil)	5	1.450.000	7.250.000	5	1.450.000
3.	Keranjang	25	30.000	750.000	2	375.000
4.	Lampu	4	10.000	40.000	1	40.000
5.	Timbangan Duduk	1	500.000	500.000	5	100.000
6.	Peralatan Kebersihan	1	23.000	23.000	2	11.500
7.	Truck	1	58.000.000	58.000.000	10	5.800.000
8.	Pick Up	1	45.000.000	45.000.000	10	4.500.000
9.	Timba	5	10.000	50.000	1	50.000
10.	Handphone	1	300.000	300.000	3	100.000
Total				131.913.000		16.426.500

b. Biaya Tetap

No.	Komponen Biaya Tetap	Harga (Rp)
1.	Penyusutan	16.426.500
2.	Perawatan peralatan kerja	10.000.000
3.	Gaji TK ($1.200.000 \times 8 \times 12$)	115.200.000
4.	Retribusi	528.000
Total		142.154.500

c. Biaya Variabel

No.	Komponen Biaya Variabel	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp x 12 Bulan)
1.	Ikan Tuna 12 ton Ikan Tongkol 10 ton Ikan Lemuru 10 ton	15.000/kg 12.000/kg 8.000/kg	2.160.000.000 1.440.000.000 960.000.000
2.	Lakban 6 rol	7.500	540.000
3.	Bahan bakar Truck 180 liter Bahan bakar Pick Up 50 liter	5.500	11.880.000 5.280.000
4.	Es Balok	120.000	1.440.000
5.	Biaya komunikasi	100.000	1.200.000
6.	Biaya listrik	120.000	1.440.000
7.	Biaya air	50.000	600.000
Total			4.582.380.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 142.154.500,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 4.582.380.000,00

➤ Biaya Total (TC) = 142.154.500 + 4.582.380.000
= Rp 4.724.534.500,00

➤ Total Penerimaan (TR) :

a. Ikan Tuna = 12.000 Kg x 17.000 x 12 = Rp 2.448.000.000,00

b. Ikan Tongkol = 10.000 Kg x 13.000 x 12 = Rp 1.560.000.000,00

c. Ikan Lemuru = 10.000 Kg x 9.000 x 12 = Rp 1.080.000.000,00

d. Total (TR) = Rp 5.088.000.000,00

➤ Keuntungan :

a. Per Tahun = 5.088.000.000 – 4.724.534.500

= Rp 363.465.500,00

b. Per Bulan = Rp 30.289.000,00

5. Usaha Penjualan Ikan Segar

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Meja	2	70.000	140.000	5	28.000
2.	Wadah Ikan	10	12.000	120.000	2	60.000
3.	Pisau	1	8.000	8.000	2	4.000
4.	Timbangan	1	150.000	150.000	10	15.000
5.	Terpal	1	70.000	70.000	2	35.000
6.	Kursi	2	45.000	90.000	5	18.000
Total				578.000		160.000

b. Biaya Tetap Per Tahun (FC)

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	160.000
2.	Perawatan Alat	50.000
3.	Biaya Kebersihan	250.000
Total		460.000

c. Biaya Variabel (VC) Per Tahun

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Nilai (Rp x 250 hari)
1.	Cumi-cumi	5 Kg	20.000	25.000.000
2.	Ikan Tongkol	5 Kg	12.000	15.000.000
3.	Ikan Kakap	5 Kg	18.000	22.500.000
4.	Ikan Tuna	5 Kg	15.000	18.750.000
5.	Ikan Lemuru	5 Kg	10.000	12.500.000
6.	Biaya Transportasi	PP	10.000	2.500.000
7.	Es	2 Balok	8.000	4.000.000
Total				100.250.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 460.000,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 100.250.000,00

➤ Biaya Total (TC) = 460.000 + 100.250.000

= Rp 100.710.000,00

➤ Penerimaan :

a. Cumi-cumi = 5 Kg x 23.000 x 250 = Rp 28.750.000,00

b. Tongkol = 5 Kg x 14.000 x 250 = Rp 17.500.000,00

c. Kakap = 5 Kg x 22.000 x 250 = Rp 27.500.000,00

d. Tuna = 5 Kg x 18.000 x 250 = Rp 22.500.000,00

e. Lemuru = 5 Kg x 13.000 x 250 = Rp 16.250.000,00

f. Total = Rp 112.250.000,00/tahun

➤ Keuntungan :

a. Per Tahun = 112.500.000 – 100.710.000
= Rp 11.790.000,00

b. Per Hari = Rp 47.000,00

6. Usaha Penjualan Produk Olahan

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Meja	2	70.000	140.000	5	28.000
2.	Wadah Ikan	10	12.000	120.000	2	60.000
3.	Pisau	1	8.000	8.000	2	4.000
4.	Timbangan	1	150.000	150.000	10	15.000
5.	Terpal	1	70.000	70.000	2	35.000
6.	Kursi	2	45.000	90.000	5	18.000
Total				578.000		160.000

b. Biaya Tetap Per Tahun (FC)

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	160.000
2.	Perawatan Alat	50.000
3.	Biaya Kebersihan	250.000
Total		460.000

c. Biaya Variabel Per Tahun (VC)

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Nilai (Rp x 250 hari)
1.	Terasi	3 Kg	40.000	30.000.000
2.	Ikan Asin Layur	3 Kg	25.000	18.750.000
3.	Ikan Asin Dodok	3 Kg	20.000	15.000.000
4.	Ikan Teri	3 Kg	45.000	33.750.000
5.	Biaya Transportasi	PP	10.000	2.500.000
Total				100.000.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 460.000,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 100.000.000

➤ Biaya Total (TC) = 100.000.000 + 460.000
= Rp 100.460.000,00

➤ Penerimaan :

a. Terasi = 3 Kg x 50.000 x 250 = Rp 37.500.000,00

b. Asin Layur = 3 Kg x 28.000 x 250 = Rp 21.000.000,00

c. Asin Dodok = 3 Kg x 23.000 x 250 = Rp 19.500.000,00

d. Teri = 3 Kg x 48.000 x 250 = Rp 36.000.000,00

e. Total = Rp 111.750.000,00

➤ Keuntungan :

a. Per Tahun = 111.750.000 – 100.460.000
= Rp 11.290.000,00

b. Per Hari = Rp 45.000,00

7. Usaha Pengolahan Ikan Asin

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Tempat Penjemuran	20	60.000	1.200.000	4	300.000
2.	Tempat Pencucian	1	2.000.000	2.000.000	10	200.000
3.	Tempat Perendaman	6	1.500.000	1.500.000	10	150.000
4.	Timbangan	1	200.000	200.000	5	40.000
5.	Keranjang	5	20.000	100.000	2	50.000
6.	Ember	5	20.000	100.000	2	50.000
Total				5.100.000		790.000

b. Biaya Tetap 1 tahun

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	790.000
2.	Perawatan Peralatan	100.000
3.	Retribusi	118.800
Total		1.008.800

c. Biaya Variabel

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp x 60)
1.	Ikan Layur	40 Kg	10.000	24.000.000
2.	Ikan Selar	40 Kg	10.000	24.000.000
3.	Garam	25 Kg	10.000	15.000.000
Total				63.000.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 1.008.800,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 63.000.000,00

➤ Biaya Total = 1.008.800 + 63.000.000
= Rp 63.008.800,00

➤ Jumlah Produksi/siklus = 50 Kg

- Rata-rata harga/Kg = Rp 28.000,00
- Penerimaan (TR) 1 tahun = $50 \times 28.000 \times 60$
= Rp 84.000.000,00
- Keuntungan (π) 1 tahun = $84.000.000 - 63.008.800$
= Rp 20.991.200,00
- Keuntungan (π) per siklus = Rp 350.000,00

8. Usaha Pengolahan Terasi

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Timbangan	1	200.000	200.000	5	40.000
2.	Alat Penumbuk	1	70.000	70.000	5	14.000
3.	Kain Saring	10	10.000	100.000	1	100.000
4.	Ember	4	40.000	40.000	2	20.000
Total				410.000		174.000

b. Biaya Variabel 1 Tahun (60x proses pengolahan)

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit	Harga Total (x 60)
1.	Udang Rebon	3 Keranjang	80.000	14.400.000
2.	Garam	9 Kg	10.000	5.400.000
3.	Pewarna Makanan	10 Bungkus	1.400	840.000
Total				20.640.000

c. Biaya Tetap

No.	Komponen Biaya Tetap	Harga (Rp)
1.	Penyusutan	174.000
2.	Perbaikan Alat	100.000
3.	Retribusi	118.800
Total		392.800

d. Penerimaan dan Keuntungan

- Diketahui :
 - a. Biaya Tetap (FC) = Rp 392.800,00
 - b. Biaya Variabel (VC) = Rp 20.640.000,00
- Biaya Total (TC) = $20.640.000 + 392.800$
= Rp 21.032.800,00
- Jumlah produksi/siklus = 20 Kg
- Rata-rata harga/Kg = Rp 40.000,00
- Penerimaan (TR) 1 tahun = $20 \times 40.000 \times 60$
= Rp 48.000.000,00
- Keuntungan (π) 1 tahun = $48.000.000 - 21.032.800$
= Rp 26.967.200/tahun
- Keuntungan (π) per siklus = Rp 449.000,00

9. Usaha Penjualan Bakso

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Gerobak	1 Unit	1.500.000	1.500.000	10	150.000
2.	Peralatan Masak	1 Unit	700.000	700.000	10	70.000
3.	Peralatan Makan	1 Unit	100.000	100.000	5	20.000
Total				2.300.000		240.000

b. Biaya Tetap Per Tahun (FC)

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	240.000
2.	Perbaikan Alat	30.000
Total		270.000

c. Biaya Variabel Per Tahun (VC)

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Nilai (Rp x 280 Hari)
1.	Daging Sapi	1 Kg	50.000	14.000.000
2.	Tepung	1 Kg	9.000	2.520.000
3.	Bumbu dan Sayuran	1 Paket	25.000	7.000.000
4.	Mie	1 Kg	4.000	1.120.000
5.	LPG	½ Kg	16.000	2.240.000
Total				26.880.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

- a. Biaya Tetap (FC) Per Tahun = Rp 270.000,00
 b. Biaya Variabel (VC) Per Tahun = Rp 26.880.000,00

- Biaya Total (TC) Per Tahun = $270.000 + 26.880.000$
 = Rp 27.150.000,00

➤ Penerimaan (TR) :

- a. Volume Penjualan/hari = 28 porsi (Rp5.000,00/porsi)
 b. Penerimaan (TR) Per Tahun = $28 \times 5.000 \times 280$ hari
 = Rp 39.200.000,00

➤ Keuntungan (π) :

- a. (π) Per Tahun = $39.200.000 - 27.150.000$
 = Rp 12.050.000,00
 b. (π) Per Hari = Rp 43.000,00

10. Usaha Penjualan Es Degan

a. Modal Investasi

No.	Modal Investasi	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Harga Total (Rp)	Umur Teknis	Penyusutan (Rp)
1.	Gerobak	1	1.500.000	1.500.000	7	214.285
2.	Sendok	2	15.000	30.000	2	15.000
3.	Gelas	2	25.000	50.000	2	25.000
4.	Kursi Panjang	1	40.000	40.000	2	20.000
Total						274.285

b. Biaya Tetap Per Tahun (FC)

No.	Komponen Biaya Tetap	Nilai (Rp)
1.	Penyusutan	274.285
2.	Perbaikan Alat	30.000
3.	Biaya Kebersihan (1000 x 280 hari)	280.000
Total		334.285

c. Biaya Variabel Per Tahun (VC)

No.	Komponen Biaya Variabel	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Nilai (Rp x 280 Hari)
1.	Degan	15	3.000	12.600.000
2.	Gula	1	12.000	3.360.000
3.	Sedotan	1	2.000	560.000
4.	Plastik	1	5.000	1.400.000
5.	Kresek	1	6.000	1.680.000
6.	Es Batu	10	500	1.400.000
Total				21.000.000

d. Penerimaan dan Keuntungan

➤ Diketahui :

a. Biaya Tetap (FC) = Rp 334.285,00

b. Biaya Variabel (VC) = Rp 21.000.000,00

➤ Biaya Total (TC) = 21.000.000 + 334.285

= Rp 21.334.285,00

➤ Penerimaan (TR) :

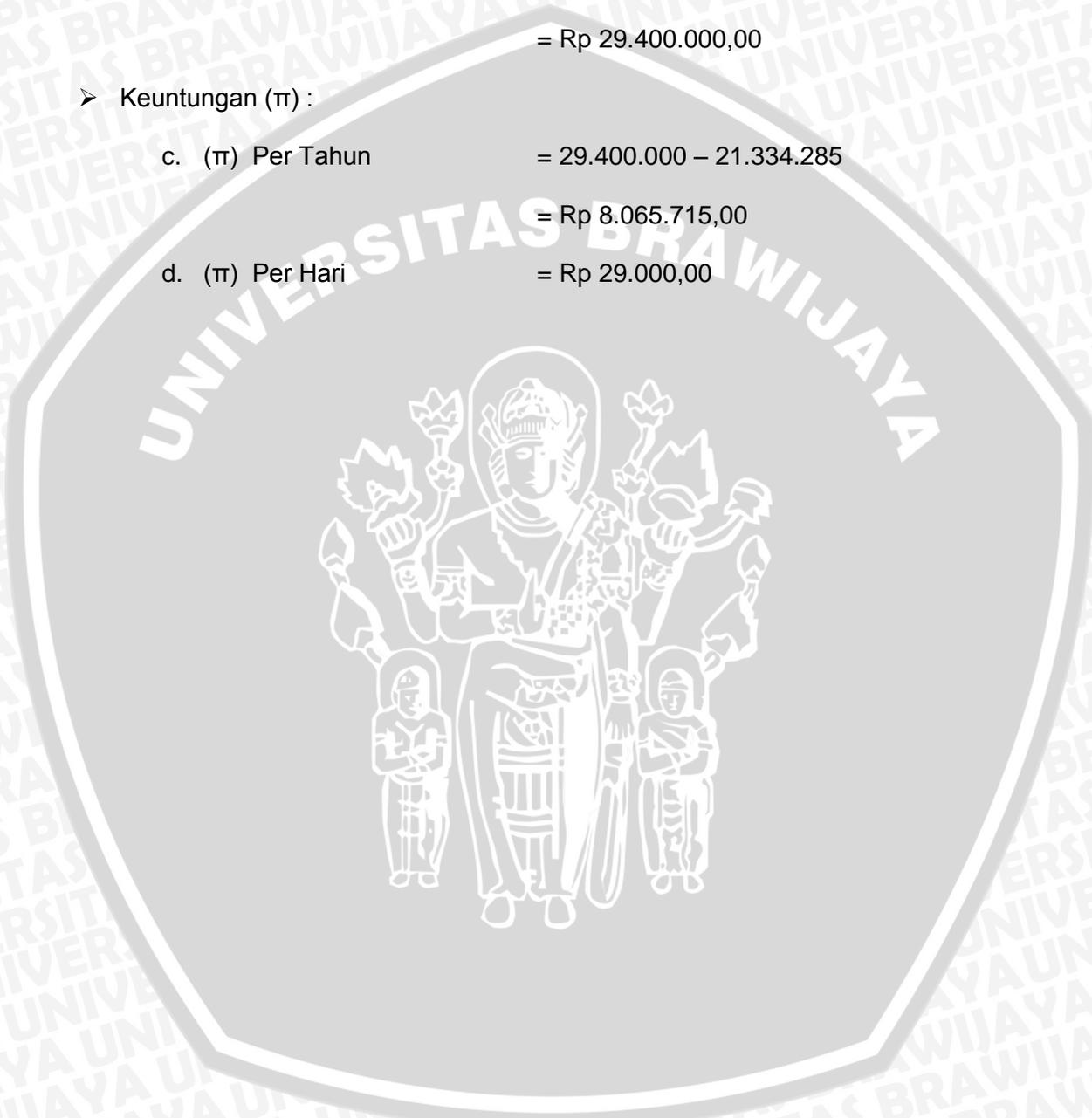
c. Volume Penjualan/hari = 30 unit (Rp 3.000,00/satuannya)

d. Penerimaan Per Tahun = 30 x 3.000 x 280 hari
= Rp 29.400.000,00

➤ Keuntungan (π) :

c. (π) Per Tahun = 29.400.000 – 21.334.285
= Rp 8.065.715,00

d. (π) Per Hari = Rp 29.000,00



Lampiran 6. Target dan Realisasi PAD Kab. Jember 2013

Tabel 2.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2013
Table 2.4.1 The Target and Realization of Local Genuine Income (PAD), 2013

No. Num	Uraian Description	Target Target (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Pendapatan Asli Daerah	2.378.574.220.186,50	2.366.375.217.230,67	99,49
1.1	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	303.845.078.814,50	308.387.728.004,68	101,50
1.1.1	Pajak Daerah	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
1	Pj. Hotel	1.450.000.000,00	2.125.544.285,00	146,59
2	Pj. Restoran	4.500.000.000,00	6.160.556.647,29	136,90
3	Pj. Hiburan	425.000.000,00	715.271.347,50	168,30
4	Pj. Reklame	4.100.000.000,00	6.141.451.314,00	149,79
5	Pj. Penyerangan Jalan	34.350.000.000,00	38.004.783.480,00	113,26
6	Pj. Parkir	81.000.000,00	98.005.490,00	120,99
7	Pj. Air Bawah Tanah	350.000.000,00	353.699.543,00	101,06
8	Pj. Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	438.772.680,00	135,01
9	PBB Pedesaan dan Perkotaan	29.000.000.000,00	25.685.324.278,01	88,57
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	14.564.735.335,25	126,65
1.1.2	Retribusi Daerah	43.333.425.540,00	44.192.346.021,00	101,98
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	22.750.737.000,00	20.714.381.457,00	91,05
2	Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan	290.400.000,00	413.596.600,00	142,42
3	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	65.000.000,00	188.611.000,00	290,17
4	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	600.000,00	4.110.000,00	685,00
5	Ret. Parkir di tepi Jalan Umum	8.136.000.000,00	8.576.707.000,00	105,42
6	Ret. Pelayanan Pasar	4.570.766.000,00	4.601.537.040,00	100,67
7	Ret. Pengujian Kendaraan bermotor	1.107.620.000,00	1.443.227.800,00	130,53
8	Ret Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
9	Ret. Penyedotan dan Penyediaan	50.750.000,00	29.970.000,00	59,05
10	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	632.231.700,00	252,89
11	Ret. Sewa Rumah Dinas	43.320.000,00	54.870.000,00	126,66
12	Ret Pemakaian Kekayaan Daerah	960.008.540,00	874.246.815,00	91,07
13	Ret. Pasar Grosir/Pertokoan	150.000.000,00	102.000.000,00	68,00
14	Ret Terminal	835.000.000,00	814.543.500,00	97,55

Lanjutan Tabel/Continued Table : 2.4.1

No. Num	Uraian Description	Target Target (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Ret. Khusus Tempat Parkir	279.800.000,00	302.955.000,00	108,28
16	Ret Tempat Penginapan / Villa Pesanggrahan	990.000.000,00	916.258.820,00	92,55
17	Ret. RPH	146.000.000,00	142.444.000,00	97,56
18	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.722.000.000,00	1.673.516.250,00	97,18
19	Ret. IMB	642.000.000,00	2.548.902.819,00	397,03
20	Ret. Ijin Gangguan	200.000.000,00	102.095.020,00	51,05
21	Retribusi Ijin Trayek	39.415.000,00	48.741.200,00	123,66
22	Ret. Ijin Usaha Perikanan	10.000.000,00	3.300.000,00	33,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.411.667.410,50	11.411.667.411,06	100,00
1	RI. Bank Jatim (pendiri)	4.440.289.612,00	4.440.289.612,00	100,00
2	PD Perkebunan	6.966.077.798,00	6.966.077.798,56	100,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan	163.018.985.864,00	157.595.570.163,57	96,67
1	Penjualan Hasil Pertanian	375.000.000,00	254.750.000,00	67,93
2	Penjualan Hasil Peternakan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
3	Penjualan Hasil Perikanan	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
4	Penjualan Hasil Lelang Barang Bekas Bongkar	10.000.000,00	0,00	0,00
5	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	6.510.043.841,98	186,00
6	Bunga Deposito pada Bank Jatim	12.500.000.000,00	17.708.047.948,19	141,66
7	Penerimaan Lain-lain	0,00	3.005.608.323,40	0,00
8	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)	146.471.485.864,00	129.954.620.050,00	88,72
1.2	Dana Perimbangan	1.595.981.135.232,00	1.588.889.984.735,99	99,56
1.2.1	Bagi Hasil Pajak & Bagi Hasil Bukan Pajak	90.567.533.232,00	96.875.112.736,00	106,96
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	76.531.630.541,00	80.529.671.978,00	105,22
1	PBB	32.381.682.119,00	37.445.206.465,00	115,64
2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP Dalam Negeri dan PPh Ps. 21	33.736.766.087,00	18.725.686.846,00	78,89
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	20.413.182.335,00	24.358.878.667,00	119,33

Lanjutan Tabel/Continued Table : 2.4.1

No. Num	Uraian Description	Target Target (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	14.035.902.691,00	16.345.440.758,00	116,45
1	Provisi Sumber Daya Hutan	1.289.782.185,00	1.390.450.317,00	107,81
2	Iuran Tetap/Landrent	15.002.700,00	3.783.272,00	25,22
3	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (royalti)	21.719.000,00	31.517.264,00	145,11
4	Penerimaan Pungutan ush Perikanan	289.738.431,00	347.408.873,00	119,90
5	Pertambangan Minyak Bumi	11.663.901.000,00	12.491.742.354,00	107,10
6	Pertambangan Gas Bumi	738.838.000,00	2.080.538.678,00	281,60
7	Pertambangan Panas Bumi	16.921.375,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.417.603.982.000,00	1.417.603.982.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	87.809.620.000,00	74.410.889.999,99	84,74
1.3	Pendapatan Lain-lain Daerah yang Sah	478.748.006.140,00	469.097.504.490,00	97,98
1.3.1	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.101.880.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	109.393.899.620,00	101.286.332.287,00	92,59
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.494.320.506,00	29.196.890.911,00	92,71
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33.377.834.663,00	30.803.530.436,00	92,29
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	44.284.578.629,00	41.065.260.374,00	92,73
4	Pajak Air Permukaan	237.165.822,00	220.650.566,00	93,04
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	346.066.002.828,00	345.581.550.000,00	99,86
1	Pendapatan DP Tamb. Penghasilan Guru PNS	3.148.237.500,00	3.148.237.500,00	100,00
2	Pendapatan Tunjangan Profesi Guru PNSD	342.917.765.328,00	341.951.665.000,00	99,72
3	Dana LOAN WISMP 2	0,00	481.647.500,00	0,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemda Lainnya	22.018.735.000,00	22.062.160.000,00	100,20
1	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	22.018.735.000,00	22.062.160.000,00	100,20
1.3.5	Dana Darurat	167.488.692,00	167.462.203,00	99,98
	Dana Bagi Hasil Retribusi Penjualan Kayu Jati	167.488.692,00	167.462.203,00	99,98

Tabel 2.4.2 **Rencana dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2013**
Table The Plan and Realization of Local Income Regency of Jember, 2013

Uraian Pendapatan Income Description	Rencana Plan	Realisasi Realization	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bagian Sisa Lebih perhitungan Anggaran The Lalu	-	-	-
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	303.845.078.814,50	308.387.728.004,68	101,50
2.1 Pajak Daerah	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
2.2 Retribusi Daerah	43.333.425.540,00	44.192.346.021,00	101,98
2.3 Bagian Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.411.667.410,50	11.411.667.411,06	100,00
2.4 Lain-lain Pendapatan asli daerah yg sah	163.018.985.864,00	137.399.370.163,37	90,07
3. Bagian Dana Perimbangan	1.595.981.135.232,00	1.588.889.984.735,99	99,56
3.1 Bagi Hasil Pajak	76.531.630.541,00	80.529.671.978,00	105,22
3.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	14.035.902.691,00	16.345.440.758,00	116,45
3.3 Dana Alokasi Umum	1.417.603.982.000,00	1.417.603.982.000,00	100,00
3.4 Dana Alokasi Khusus	87.809.620.000,00	74.410.889.999,99	84,74
4. Bagian Lain-lain Pendapatan Yang Sah	478.748.006.140,00	469.097.504.490,00	97,98
4.1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.101.880.000,00	0,00	0,00
4.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	109.393.899.620,00	101.286.332.287,00	92,59
4.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	346.066.002.828,00	345.581.550.000,00	99,86
4.4 Dana Keuangan dari Provinsi/Pemda	22.018.735.000,00	22.062.160.000,00	100,20
4.5 Dana Bagi Hasil Restribusi	167.488.692,00	167.462.203,00	99,98
Jumlah Total	2.378.574.220.185,50	2.366.375.217.230,67	99,49

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
 Source : Local Income Service Regency Government of Jember

Lampiran 7. Target dan Realisasi PAD Jawa Timur 2013

Tabel 3.3: APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2013

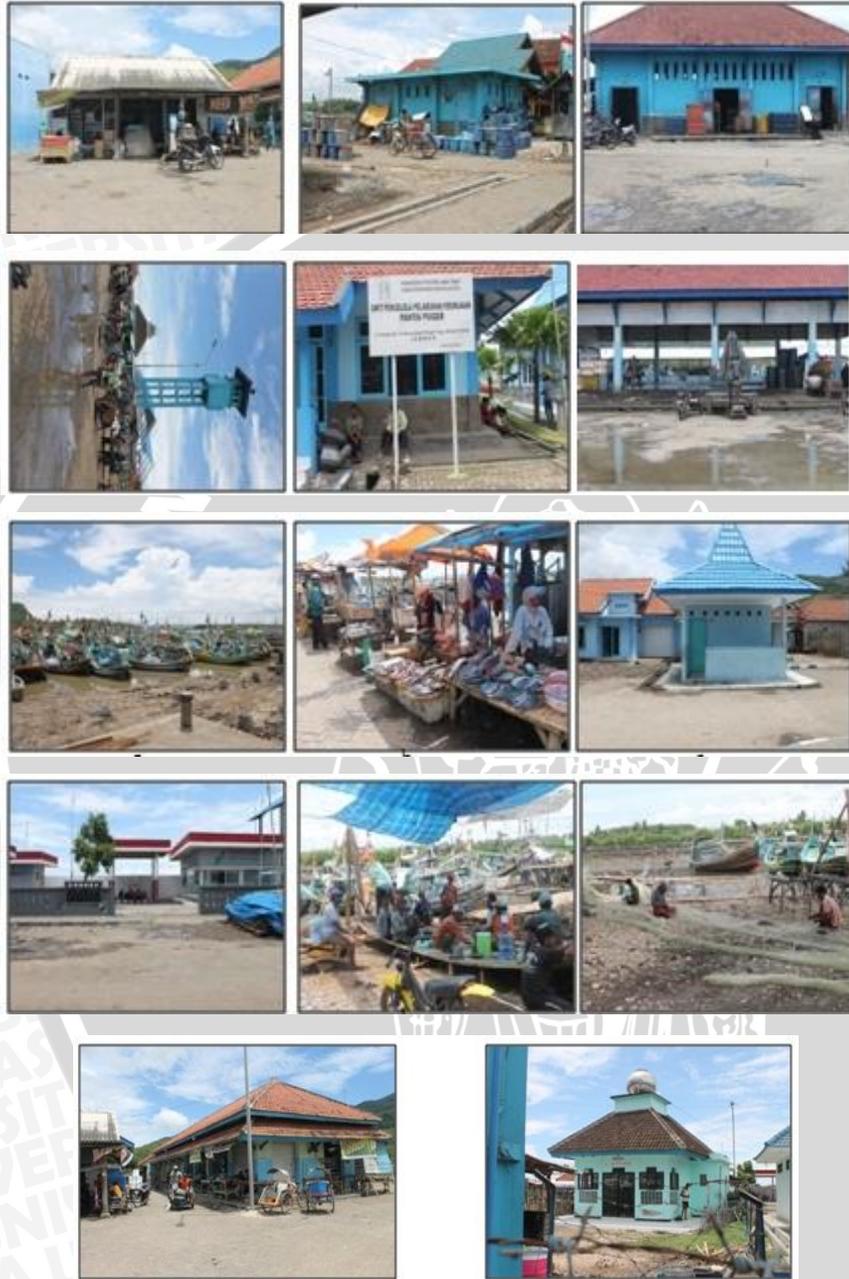
rupiah

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Pendapatan	68,841,287,460,674	67,529,488,243,187	101.08%
PAD	8,358,118,360,243	8,062,349,747,889	108.88%
Pajak daerah	4,312,809,352,019	4,638,953,465,901	108.03%
Retribusi daerah	1,217,323,613,391	1,218,468,409,436	100.00%
Hasil pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan	391,110,000,000	300,535,444,294	92.18%
Lain-lain PAD yang sah	2,434,872,794,753	2,814,392,338,009	115.50%
Dana Perimbangan	87,188,864,674,818	87,112,585,865,870	88.86%
DBH	3,866,738,898,316	3,948,002,928,970	102.10%
DAU	30,943,014,776,000	30,944,073,301,000	100.00%
DAK	2,357,100,000,000	2,220,508,126,000	94.21%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11,418,298,628,015	11,884,568,129,529	89.63%
Hibah	45,883,561,885	30,023,049,888	67.40%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	7,404,407,163,769	7,037,917,561,043	95.05%
Dana Bagi Hasil dari Prov	2,970,368,704,833	3,040,771,103,663	102.37%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	421,849,135,000	682,127,865,606	161.70%
Lainnya	573,850,930,528	572,818,149,529	99.47%
Belanja	82,868,048,487,247	66,761,802,211,868	88.88%
Belanja Tidak Langsung	37,284,421,117,877	34,426,228,122,889	82.81%
Belanja Pegawai	32,051,295,188,348	29,706,825,098,635	92.69%
Belanja Bunga	5,730,778,589	3,550,163,806	61.73%
Belanja Hibah	1,963,111,743,931	1,857,714,113,563	94.63%
Belanja Subsidi	6,672,032,000	1,653,291,300	24.78%
Belanja Bantuan sosial	700,407,875,838	546,897,964,523	78.08%
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	312,649,877,949	289,923,554,473	92.73%
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	2,085,922,698,023	1,982,434,615,124	95.04%
Belanja tidak terduga	168,610,923,002	38,210,288,661	21.48%
Belanja Langsung	25,361,826,378,670	21,328,673,088,787	84.09%
Belanja Pegawai	1,016,070,977,121	932,996,923,861	91.82%
Belanja Barang dan jasa	11,775,069,407,851	10,440,613,398,119	88.67%
Belanja Modal	12,570,434,994,598	9,953,062,767,756	79.18%
Surplus / (Defisit)	(5,714,778,048,873)	1,777,681,081,381	
Pembiayaan Netto	6,804,829,418,224	6,448,872,202,483	88.88%
Penerimaan Pembiayaan	8,412,275,465,451	8,048,812,868,888	94.89%
SILPA TA sebelumnya	6,152,067,738,724	5,832,250,377,788	94.80%
Pencairan dana cadangan	104,500,000,000	106,197,309,955	101.62%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	2,775,000	
Penerimaan Kembali Pembelian Pinjaman	42,877,438,036	41,588,489,806	99.08%
Penerimaan Rutang Daerah	48,987,915,379	40,863,413,451	87.00%
Penerimaan Lainnya	65,832,363,312	25,718,290,700	39.07%
Pengeluaran Pembiayaan	807,348,042,227	688,940,464,205	88.29%
Pembentukan Dana Cadangan	165,080,520,001	381,417,163,758	218.93%
Pemvortan Modal (Investasi) Daerah	302,130,118,629	171,612,327,617	50.80%
Pembayaran Pokok Utang	44,877,463,351	38,217,329,513	85.16%
Lainnya	95,257,938,246	25,694,031,317	26.97%
SILPA		7,227,263,293,776	

Sumber: LRA Kab/Kota Th IV 2013

Lampiran 8. Dokumentasi

1. Dokumentasi Fasilitas UPPPP Puger



2. Dokumentasi Lingkungan UPPPP Puger



